

FATWA DSN-MUI DAN MPS BNM TENTANG MUSYARAKAH
(Analisis atas Dalil dan Metode *Istinbāṭ al-Hukmi*)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

GULBUDIN HEKMATYAR BIN LUKMAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM : 140102238

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ARRANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2018 M/ 1439 H

FATWA DSN-MUI DAN MPS BNM TENTANG MUSYARAKAH
(Analisis atas Dalil dan Metode *Istinbāt al-Hukmi*)

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam –Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S 1) dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh

GULBUDIN HEKMATYAR BIN LUKMAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 140102238

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA
NIP: 195301121982031008

Pembimbing II,



Dr. Mursyid S.Ag., M.HI
NIP 197702172005011007

**FATWA DSN-MUI DAN MPS BNM TENTANG MUSYARAKAH
(Analisis atas Dalil dan Metode *Istinbāṭ al-Hukmi*)**

SKRIPSI

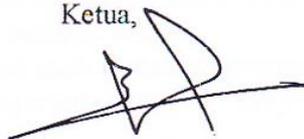
Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan dinyatakan
lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Senin, 29 Januari 2018 M
12 Jumadil Awwal 1439 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA
NIP: 195301121982031008

Sekretaris,



Dr. Mursyid, S.Ag. M.HI
NIP: 197702172005011007

Penguji I,



Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA
NIP: 194810181986011001

Penguji II,



Dr. Badrul Munir, Lc, MA
NIP:

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag. M.Ag.
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Gulbuddin Hekmatyar Bin Lukman
NIM : 140102238
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2018

Yang Menyatakan



(Gulbuddin Hekmatyar Bin Lukman)

ABSTRAK

FATWA DSN MUI DAN MPS BNM TENTANG *MUSYARAKAH* (Analisis Dalil dan Metode *Istinbāt Al-Hukmi*)

Nama : Gulbuddin Hekmatyar bin Lukman
Nim : 140102238
Fakultas/ Prodi : Syari'ah Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Tanggal Munaqasyah : 29 Januari 2018 M/ 12 Jumadil Awwal 1439 H
Tebal Skripsi : 101 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA.
Pembimbing II : Dr. Mursyid S.Ag.,M.HI

Kata Kunci : Fatwa, DSN MUI, MPS BNM, *Musyārahah*, Dalil, *Istinbāt al-Hukmi*.

Musyārahah merupakan satu akad *musammā* berasaskan konsep kerjasama (*isytirak*). Sesuai perkembangan, muncul kreasi baru produk keuangan berdasarkan konsep *musyārahah*. DSN MUI di Indonesia dan MPS BNM di Malaysia selaku regulator Ekonomi Syariah telah mengeluarkan keputusan mengenai produk baru berdasarkan *musyārahah*. Meskipun demikian, setiap lembaga ini mempunyai pendekatan penetapan fatwanya yang tersendiri. Skripsi ini ingin meneliti bagaimana beda fatwa DSN MUI dan MPS BNM tentang *musyārahah*, juga bagaimana dalil serta metode *istinbāt al-hukmi* yang digunakan DSN MUI dan MPS BNM. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Sumber primer adalah fatwa DSN MUI dan MPS BNM tentang akad *musyārahah*. Sumber sekunder berupa kompilasi hukum, jurnal, dan buku-buku berkenaan dengan lembaga yang terkait. Teknik pengumpulan data adalah melalui studi dokumentasi. Analisis menggunakan teknik deskriptif-komparatif dengan membandingkan fatwa DSN MUI dan MPS BNM serta mengkaji dalil dan metode *istinbāt al-hukmi* yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Fatwa DSN MUI dan MPS BNM sama-sama mengarah kepada jenis *musyārahah amwāl* berbentuk *'inān*, tetapi berbeda pada aspek sistematika fatwa dan beberapa ketentuan akad. (2) Dalil yang menjadi sandaran utama fatwa legalitas *musyārahah* oleh kedua-duanya adalah dalil-dalil utama yang disepakati yaitu Al-Quran dari Surah Sād ayat 24 dan Surah Al-Maidah ayat 1, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Tirmidzi serta Al-Daruqutni dan *ijma'* ulama' atas kebolehan *musyārahah* (3) Pada metode *istinbāt al-hukmi*, DSN MUI menggunakan *qawāid usuliyyah* dan *qawāid fihiyyah* melalui pendekatan *Naş Qathi*, pendekatan *Qauli* dan pendekatan *Manhaji*. Manakala pendekatan MPS BNM dalam putusan ini adalah dengan merujuk kepada sumber utama (al-Quran serta al-Sunnah) dan sumber kedua yaitu produk *ijtihad* yang terdiri daripada *ijma'* dan *maslahah*.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam, yang telah mengurniakan nikmat ke atas sekalian makhluk di muka bumi ini dan memuliakan umat manusia sebagai sebaik-baik makhluk yang diciptakan. Menganugerahkan kita nikmat kehidupan serta melimpahkan kita dengan rahmat dan kasih sayang-Nya melalui nikmat yang terbesar yaitu nikmat Iman dan Islam, sebagai pedoman dan panduan kehidupan. Dengannya agar kita dapat menggapai kejayaan di dunia dan akhirat. Ucapan syukur khususnya atas nikmat kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Selawat serta salam atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang diutuskan untuk menyeru manusia ke jalan yang lurus dan menunjuki umatnya kepada kebenaran dan kebahagiaan.

Skripsi yang berjudul *Fatwa DSN MUI dan MPS BNM tentang Musyārahah (Analisis Dalil dan Metode Istinbāṭ al-Hukmi)* telah selesai disusun sebagai memenuhi salah satu dari persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Sepanjang menyiapkan skripsi ini, berbagai kendala dan hambatan mewarnai penyelesaian skripsi ini. Tanpa komitmen dan bantuan dari banyak pihak serta keizinan dari Allah SWT, tidak mungkin skripsi ini terselesai dengan baik. Justru itu, penulis berbesar hati mengalungkan ucapan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry, yang telah memimpin lembaga UIN Ar-Raniry dengan seksama.
2. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

3. Bapak Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA selaku Dosen pembimbing I, dan Bapak Dr. Mursyid S.Ag, M.HI selaku Dosen pembimbing II, yang telah berkenan membimbing dengan keikhlasan berkorban meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat berguna hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Penguji I, Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim MA dan Bapak Dr. Badrul Munir Lc, MA selaku Penguji II dalam Sidang Munaqasyah penulis yang telah memberikan kesempatan, saran dan masukan yang baik untuk menyempurnakan lagi skripsi ini dengan jayanya.
5. Seluruh dosen HES khususnya yang berada di ruang jurusan yang banyak membantu dan memberi tunjuk ajar kepada penulis sepanjang penulis membuat urusan terkait akademik, skripsi, ujian komprehensif dan sebagainya.
6. Seluruh dosen, dan karyawan di lingkungan civitas akademik Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan pelayanan yang baik serta membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Ayahanda dan Ibunda yang tercinta, Haji Lukman bin Haji Muhammad dan Zaharani binti Haji Ahmad yang telah mencurahkan banyak kasih sayang, perhatian dan didikan yang tersangat berharga. Juga adinda tersayang, Nurul Haq Zahidah, Muhammad Zia Ul Haq, Muizzuddin Al-Husaini, Abdul Aziz, Bakhtiar Zuhaili, Syukrina Fitri dan Muhammad Atiqullah yang menjadi inspirasi penulis. Serta keluarga besar Haji Ahmad Tersat di Terengganu dan keluarga besar Tgk Haji Muhammad di Samalanga yang penulis kasihi.
8. Seluruh teman-teman mahasiswa/wi dari Malaysia yang bernaung di bawah Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia Cabang Aceh (PKPMI-CA) yang telah banyak memberi bantuan, doa serta kehangatan persaudaraan.

9. Teman-teman mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, khususnya dari Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Istimewa ditujukan kepada teman-teman sepengajian di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
10. Buat diri-diri yang teristimewa yang meskipun tidak dapat penulis sebutkan, yang secara langsung atau tidak langsung telah membantu dan memberi ilham buat penulis semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baik ganjaran. Pada akhirnya, dengan sepenuh kerendahan hati, penulis menyadari dan mengakui bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang sesungguhnya. Maka penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari semua pihak dalam upaya penyempurnaan karya tulis ini di masa akan datang.

Sesungguhnya Allah SWT jualah pemilik kesempurnaan di atas segalanya. Maka hanya pada-Nya tempat penulis berlindung dan berharap. Semoga usaha yang penulis persembahkan dalam dunia akademik dan keilmuan ini mendapat redha-Nya sehingga bermanfaat bagi diri penulis sendiri dan bagi sekalian para pembaca pada umumnya. {“Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufiq bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali.” (Maksud firman Allah SWT Surah Hud : 88)}

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 01 Januari 2018
Penulis,

Gulbuddin Hekmatyar bin Lukman

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ وَ	<i>Fathah dan Wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
اِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
اُ	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قَالَ: *qāla*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَقُولُ: *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah*(ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah*(ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

الأطفالِ رَوْضَةٌ: *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ: *al-Madīnah al- Munawwarah/*

al-Madīnatul munawwarah

طَلْحَةَ: *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Musyārahah*
- Lampiran 2. Resolusi MPS BNM Nomor29 tentang Pembiayaan *Musyārahah*
- Lampiran 3. Struktur Organisasi dan Keanggotaan DSN MUI
- Lampiran4. Struktur Organisasi dan Keanggotaan MPS BNM

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGHANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv

BAB SATU : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Penjelasan Istilah	7
1.5 Kajian Kepustakaan	12
1.6 Metode Penelitian	15
1.7 Sistematika Pembahasan	18

BAB DUA : KONSEP MUSYARAKAH DALAM FIKIH MUAMALAH

2.1 Pengertian <i>Musyārahah</i>	20
2.2 Dasar Hukum <i>Musyārahah</i>	24
2.3 Macam-macam <i>Musyārahah</i>	28
2.4 Rukun dan Syarat-syarat <i>Musyārahah</i>	32
2.5 Berakhirnya <i>Musyārahah</i>	41
2.6 <i>Musyārahah</i> dalam Konteks Kontemporer	43

BAB TIGA : FATWA DSN MUI DAN MPS BNM TENTANG MUSYARAKAH

3.1 Profil DSN-MUI dan MPS BNM	51
3.1.1 Sejarah DSN MUI dan MPS BNM	51
3.1.2 Posisi DSN MUI dan MPS BNM di Negara Masing-masing	53

3.1.3 Peran, Fungsi serta Wewenang DSN MUI dan MPS BNM.....	55
3.1.4 Prosedur serta Mekanisme Pembuatan Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dan MPS BNM	57
3.2 Fatwa DSN-MUI dan MPS BNM tentang <i>Musyārahah</i>	59
3.2.1 Latar Belakang Lahirnya Fatwa DSN MUI dan MPS BNM tentang <i>Musyārahah</i>	59
3.2.2 Fatwa DSN MUI tentang <i>Musyārahah</i>	62
3.2.3 Fatwa MPS BNM tentang <i>Musyārahah</i>	65
3.3 Dalil dan Metode <i>Istinbāṭ al-Hukmi</i> Fatwa DSN-MUI dan MPS BNM tentang <i>Musyārahah</i>	67
3.3.1 Dalil-dalil yang Digunakan.....	67
3.3.2 Metode-metode <i>Istinbāṭ al-Hukmi</i> yang Digunakan.....	75

BAB EMPAT : PENUTUP

4.1 Kesimpulan	92
4.2 Saran-saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai persoalan suatu kejadian atau peristiwa dalam artian memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.¹ Pengertian fatwa secara etimologis berasal dari bahasa Arab *al-fatwa* (الفتوى). Menurut Ibnu Manzur kata fatwa ini merupakan bentuk *maṣḍar* dari kata *fatā* (فتى)- *yaftū* (يفتو)- *fatwan* (فتوى) yang bermakna muda, baru, penjelasan, dan penerangan.² Dalam ilmu *uṣūl fiqh*, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau ahli fikih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.³ Fatwa juga dapat diterjemahkan sebagai petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.⁴

Salah satu hal utama dalam proses penetapan suatu fatwa adalah prosedur penemuan hukumnya. Apa saja pembahasan fikih pada dasarnya prosedur penemuan hukumnya harus berjalan sesuai pendekatan yang telah disepakati para ulama terdahulu yaitu melalui metode *uṣūl fiqh*, kemudian ditelusuri melalui kaidah syara' yaitu *qawāid fiqhiyyah* serta dilengkapi dengan pendekatan *maqāsid syari'ah*. Melalui mekanisme tersebut para ulama berupaya

¹Yusuf Qardawi, *al-Fatwa baina al-Indibaḍ wa al-Tasayyub* (Mesir: Dar Sahwah, 1988), hlm. 11.

²Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab* Juz. 10, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, t.th), hlm. 183.

³Ma'aruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (Depok: Elsas, 2008), hlm 20.

⁴Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 409.

menghasilkan produk hukum yang digali dari *naş syara'* yang utama yaitu Al-Quran dan Sunnah. Juga hasil dari kombinasi pendapat para ulama generasi awal serta manhaj para imam pendiri mazhab terdahulu yang masih diguna pakai hingga saat ini.

Meskipun pada zaman ini sebagian permasalahan baru yang timbul merupakan suatu hal yang berbeda dengan permasalahan fikih klasik akan tetapi dengan beberapa penyesuaian, metode penetapan hukumnya masih dapat diberlakukan dalam mencari suatu kesimpulan hukum. Maka dalam hal ini diperlukan kemampuan yang mumpun untuk mengharmonisasikan dan menyesuaikan permasalahan yang timbul pada hari ini dengan metode *istinbāt* ulama terdahulu dalam menetapkan suatu hukum. Cara ini digunakan oleh para ulama baik secara individu maupun di dalam organisasi keagamaan dan fatwa.

Syirkah atau *musyārahah* berasal dari akar kata dalam bahasa arab, *syirkatan* (*maşdar*/kata dasar) dan *syarika* (*fi'il mađi*/kata kerja) yang berarti mitra/sekutu/kongsi/serikat. Secara bahasa, *syirkah* berarti *al-ikhtilāf* (penggabungan atau pencampuran). Secara umum, *syirkah* dibedakan menjadi dua yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah 'uqūd* (akad).⁵ *Syirkah amlak* terdiri dari *amlak ikhtiāri* (opsional) dan *amlak ijbāri* (mutlak) sementara *syirkah 'uqūd* atau *musyārahah* yang menjadi fokus skripsi ini terdiri dari *syirkah amwāl* (harta/aset), *syirkah abdān* (keterampilan) dan *syirkah wujūh* (reputasi/*good will*).

Selain dari jenisnya, *syirkah* juga dibagi berdasarkan porsi penyertaan modal yaitu berupa *syirkah 'inān* jika porsi modal para pihak yang bermitra tidak sama, sementara jika masing-masing pihak

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, (Kaherah: Fath 'Ilam Arabi, t.th), hlm. 202.

yang bermitra menyertakan porsi modal secara setara hal itu dinamakan *syirkah mufāwadah*.⁶ Menurut Dewan Syariah Nasional, *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih atas suatu usaha tertentu, dimana masing masing pihak saling memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁷

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberi jawaban dan pencerahan atas permasalahan yang dihadapi umat. Hasil jawaban tersebut dituang dalam bentuk fatwa keagamaan untuk dijadikan pedoman masyarakat. Hal ini mengingat karena fatwa adalah salah satu dari lima produk pemikiran hukum Islam yaitu kitab-kitab fikih, keputusan pengadilan agama, perundangan yang berlaku di negara muslim, kompilasi hukum Islam, dan fatwa.⁸ Peran terkait penetapan fatwa ekonomi syariah merupakan tanggungjawab Dewan Syariah Nasional-MUI. Tugas dan fungsi utamanya adalah mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah sebagai pedoman bagi praktisi dan regulator, menerbitkan rekomendasi, sertifikasi, dan izin syariah bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah.

Dalam mengeluarkan suatu fatwa yang berkaitan ekonomi syariah DSN-MUI secara umumnya tetap terikat dengan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Proses *istinbāt* hukumnya menggunakan pendekatan berpandukan kepada *naş-naş* yang utama

⁶Tim Penyusun, *Buku Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah* (Jakarta: OJK, 2016), hlm. 9.

⁷DSN MUI, *Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2002 tentang Musyarakah*, hlm 1.

⁸Moh.Tolchah, “Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Pemikiran M.Atho Mudzhar)”, *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam El-Banat* , 2011, hlm. 50.

yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Jika tidak ditemukan maka disandarkan kepada hasil *ijtihad* para ulama terdahulu yang terangkum dalam kitab-kitab fikih yang mu'tabar. Jika ditemukan perselisihan diantara pendapat para ulama tersebut maka disesuaikan dan diharmonisasikan.

Apabila tidak mungkin dilakukan yang demikian, dipilih pendapat yang dianggap lebih kuat dari sudut dalil-dalilnya dan lebih kredibel diantara pendapat-pendapat yang ada.⁹ Untuk sebarang permasalahan baru (kontemporer) yang tidak ditemukan *naş* yang jelas tentang hal tersebut, juga tidak didapatkan pendapat-pendapat dari hasil *ijtihad* para ulama terdahulu maka anggota DSN-MUI akan melakukan *ijtihad* secara kolektif berdasarkan pendekatan para ulama terdahulu dan ulama terkemudian dengan meraikan keperluan dan kemaslahatan ummat.¹⁰

Di Malaysia, peran penetapan fatwa terkait ekonomi syari'ah khusus di bidang keuangan Islam dan takaful Islam dilaksanakan oleh Majlis Penasihat Syariah-Bank Negara Malaysia (MPS-BNM) yang telah didirikan pada tahun 1997. Badan ini merupakan salah satu badan yang berotoritas dalam membuat regulasi dan fatwa ekonomi syari'ah di Malaysia selain Majlis Fatwa Kebangsaan, Majlis Fatwa negeri-negeri dan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, badan ini diiktiraf sebagai rujukan utama dalam kasus-kasus berkaitan keuangan Islam di Malaysia.¹¹ Badan ini dianggotai oleh pakar-pakar ekonomi yang ahli di bidang syariah serta mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang

⁹MUI, *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* No: U-596/MUI/X/1997.

¹⁰Asjmuni Abdurrachman, "Prosedur Penetapan Keputusan Fatwa DSN-MUI", *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi 18, 2008, hlm. 173.

¹¹Malaysia, *Akta Bank Negara Malaysia 2009*, Seksyen 53-58.

luas tentang sistem perbankan, transaksi keuangan, ekonomi, undang-undang dan aplikasi syari'ah.

Secara ringkas metode atau pendekatan yang diguna pakai oleh MPS-BNM dalam penetapan fatwa atau resolusinya adalah dengan merujuk kepada sumber utama dan sumber kedua. Sumber utama ialah dari Al-Quran dan al-Sunnah. Sumber kedua (sekunder) ialah ijihad yang terdiri daripada *ijma'*, *qiyās*, *masalahah*, *istihsān*, *istishāb*, *sadd dzari'ah*, *'urf*, *siyāsah al-syar'iyah*, *ta'wil*, *istiqra'* dan *talfiq*. Dalam implementasinya, MPS-BNM turut mendukung pendekatan *maqāsid al-syari'ah* dan memelihara kemurniannya.¹² Pendekatan ini diaplikasikan dalam setiap keputusan yang dikeluarkan oleh MPS-BNM. Keputusan-keputusan ini perlu melalui proses perbincangan yang mendalam, proses konsultasi yang teliti dan dilakukan secara saksama sesuai ketentuan dalam standar prosedur manajemen Syariah di Malaysia.¹³

Penelitian ini akan memfokuskan pada objek penelitian tentang fatwa berkaitan *musyarakah*. Dalam hal ini, fatwa tentang *musyarakah* mempunyai keseragaman di antara kedua negara yaitu telah ada fatwa khusus tentang *musyarakah* oleh lembaga fatwa di Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya akan dianalisis latar belakang yang mendasari penetapan fatwa tersebut, dalil dan metode *istinbāt al-hukmi* yang diambil oleh DSN-MUI dan MPS-BNM dalam proses penetapan hukum tentang *musyarakah*. Pembahasan metode *istinbāt* yang difokuskan adalah kepada proses penggalian hukumnya berdasarkan dalil-dalil yang ada baik *naqli* maupun *'aqli*, proses

¹²Suhaimi Mohd Yusof dan Ahmad Hazim Alias, Pendekatan Membuat Keputusan Syariah dalam Kewangan Islam, *Jurnal Muamalat*, Bil. 1, 2008, hlm. 52-53.

¹³BNM, *Manual Rujukan Institusi Kewangan Islam Kepada Majlis Penasihat Syariah* (Malaysia: BNM, 2010), hlm. 4-6.

penetapan kesimpulan suatu fatwa, interpretasi baru yang terhasil, serta penggunaan pendekatan ilmiah melalui kombinasi faktor-faktor eksternal dan pendekatan multidisipliner lainnya yang bersesuaian.

Dengan meneliti mekanisme penetapan fatwa hukum DSN-MUI dan MPS-BNM dapat diketahui bagaimana proses pembuatan suatu produk hukum fikih berdasarkan metode *istinbāt* tertentu yang berbentuk fatwa kontemporer. Selanjutnya dapat difahami bagaimana persamaan serta perbedaan pendekatan dan metode yang wujud diantara kedua-dua institusi ini dalam proses penetapan suatu fatwa tentang hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menjadi sesuatu yang sangat bermakna, penting dan menarik ketika kita ingin melihat bagaimana pendekatan dan kaidah yang menjadi ciri khas dalam proses penetapan fatwa ekonomi syari'ah baik di Indonesia maupun Malaysia. Dari uraian diatas maka penulis tertarik membahas lebih jauh persoalan ini dengan judul “Fatwa DSN-MUI dan MPS BNM tentang *Musyārahah* (Analisis Dalil dan Metode *Istinbāt al-Hukmi*)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah metode dan pendekatan yang digunakan ketika proses penetapan suatu fatwa khusus tentang transaksi *musyārahah* oleh DSN-MUI dan juga MPS BNM. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diuraikan dalam dua bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana beda fatwa DSN-MUI dan MPS BNM tentang *musyārahah*?

2. Bagaimana dalil dan metode *istinbāt al-hukmi* yang digunakan oleh DSN-MUI dan MPS-BNM dalam fatwa yang dikeluarkan tentang *musyārahah*?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan menganalisis beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana beda fatwa DSN-MUI dan MPS BNM tentang *musyārahah*.
2. Untuk mengetahui bagaimana dalil dan metode *istinbāt al-hukmi* yang diambil oleh DSN-MUI dan MPS BNM dalam fatwa yang dikeluarkan tentang *musyārahah*.

1.4. Penjelasan Istilah

Demi menghindari kesalahan dalam memahami istilah, maka penulis merasa perlu untuk membuat beberapa pengertian istilah :

1. Fatwa

Secara bahasa fatwa berasal dari kalimat bahasa Arab *al-fatwa* (الفتوى) yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan hukum.¹⁴ Menurut Abdul Karim Zaidan arti fatwa secara istilah menyamai pengertian kalimat tersebut dari segi bahasa yang mencakupi keberadaan *muftī*, *mustafī*, *ifta'* dan *fatwa*. Akan tetapi dibatasi dengan satu ketentuan yaitu yang dikehendaki dari pertanyaan itu adalah penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada. Sedangkan dalam istilah ilmu *uṣūl al-fiqh*, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang

¹⁴Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 409.

mujtahid atau ahli fikih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus, yang sifatnya tidak mengikat.¹⁵

Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa bersifat pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat.¹⁶ Pihak yang memberi fatwa dalam istilah *uṣūl al-fiqh* disebut *muftī* manakala pihak yang meminta fatwa disebut *al-mustaftī*.¹⁷ Dalam hal fatwa ekonomi syariah, DSN MUI mengguna pakai istilah fatwa sedang MPS BNM memakai istilah resolusi dalam keputusan-keputusannya. Hal ini bagi membedakan penyebutannya dengan putusan otoritas fatwa lainnya di Malaysia seperti fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan, fatwa Majlis Fatwa negeri-negeri dan sebagainya.

2. DSN-MUI

Dewan Syariah merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah di seluruh dunia. Di Indonesia, peran ini dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mulai dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1997 dan dikukuhkan pendiriannya melalui SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999.

3. MPS BNM

Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia (MPS BNM) merupakan suatu badan penasihat yang didirikan sesuai dengan kebutuhan pendirian perusahaan dan lembaga keuangan yang berasaskan Islam di Malaysia. Ia dianggotai oleh pakar-pakar ekonomi

¹⁵Ma'aruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*,...hlm. 20.

¹⁶Yusuf Qardawi, *al-Fatwa baina al-Indibād wa al-Tasayyub*, hlm. 11.

¹⁷Nasrun Haroen dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam I*, (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1999), hlm. 326.

yang mahir di bidang syari'ah. Majelis ini mempunyai kedudukan lebih tinggi berbanding dengan komite syari'ah bank-bank komersial lainnya. Jika terdapat sebarang perbedaan pendapat antara MPS BNM dengan Komite Syariah bank lain, maka segala keputusan lembaga ini menjadi keputusan final yang mengikat.¹⁸

4. *Musyārahah*

Musyārahah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik (modal) dalam pelbagai bentuk) untuk melaksanakan sesuatu projek yang halal dan produktif. Keuntungan atau kerugian daripada kerjasama tersebut dibahagi berdasarkan syarat-syarat tertentu.¹⁹ Bentuknya menurut jumhur ulama' dibagi kepada empat bentuk yaitu *'inan*, *mufāwadhah*, *'abdan* dan *wujuh*. Menurut OJK, *musyārahah* atau *syirkah 'uqūd* terdiri dari *syirkah amwāl* (harta/aset), *syirkah abdān* (keterampilan) dan *syirkah wujūh* (reputasi/*good will*). Selain dari jenisnya, akad ini juga dibagi berdasarkan porsi penyertaan modal yaitu berupa *musyārahah 'inān* jika porsi modal para pihak yang bermitra tidak sama, sementara jika masing-masing pihak yang bermitra menyertakan porsi modal dalam jumlah yang sama hal itu dinamakan *musyārahah mufāwadhah*.²⁰ Dalam sistem perbankan dikenal beberapa istilah antaranya produk pembiayaan syari'ah berasaskan *musyārahah* dan *musyārahah mutanāqishah*.

5. Dalil

Secara etimologis dalil bermakna menunjukkan ataupun memberi tahu jalan. Sedangkan dalil yang diistilahkan dengan *adillat*

¹⁸Malaysia, *Akta Bank Negara Malaysia 2009*, Bagian 7, Seksyen 53-58. Ketentuan tentang keanggotaan DSN MUI dan MPS BNM terdapat dalam lampiran 3 dan 4 skripsi ini.

¹⁹Tim Penyusun, *Glosari Muamalat* (Malaysia: JAKIM, 2009), hlm. 53.

²⁰Tim Penyusun, *Buku Standar Produk Musyārahah dan Musyārahah Mutanāqishah* (Jakarta: OJK, 2016), hlm. 9.

al ahkām, uṣūl al ahkām, asās al tasyri' dan *adillah al syari'ah* mengacu kepada pengertian sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk sebagai alasan dalam menetapkan hukum syara' atau diartikan sebagai sesuatu yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum *syara'* yang bersifat praktis.²¹ Dalil dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, dalil-dalil *naqlī* yang keberadaannya disinggung secara langsung dalam teks suci yaitu al-Qur'an dan Sunnah (*adillah al-mansūṣah*) atau diperoleh melalui jalan periwayatan seperti *ijma'*, *'uruf*, *syar'u man qablana* dan *mazhab al shahabi*. Kedua, dalil-dalil hukum yang dirumuskan melalui analisis pemikiran (dalil *'aqli*) seperti *qiyās*, *istihsan*, *istishhāb*, *sad al-dzari'ah* dan *masālih mursalah*.

Kedua-dua macam dalil ini saling berhubungan dalam artian analisis pemikiran tetap berhajat kepada dalil *naqli* sebagai sandaran legalitasnya disisi syara'. Demikian juga dalam memahami dalil *naqli* diperlukan kemampuan untuk meneliti, menganalisis dan membuat rumusan atas *naṣ* yang wujud.²² Berdasarkan pengertian ini, para ulama menempatkan sebelas dalil tersebut sebagai landasan dalam penetapan suatu hukum. Empat darinya yaitu Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* dan *qiyās* disepakati penggunaannya oleh jumhur ulama sebagai suatu dalil hukum. Sedangkan sisanya yaitu *istihsān*, *istishlah*, *istishhāb*, *sad al-dzari'ah*, *'urf*, *syar'u man qablana*, dan *mazhab al shahabi* diperselisihkan oleh para ulama'.²³

²¹Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Mesir: Darul Qalam, 1978), hlm. 20.

²²Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Damaskus: Dar Fikr, 1999), hlm. 22.

²³Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh...*, hlm. 22.

6. Metode *Istinbāt al-hukmi*

Kata *istinbāt* berasal dari bahasa Arab “*nabī*” yang berarti air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali. Dengan demikian, menurut bahasa, arti *istinbāt* ialah mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya. Kata *istinbāt* bila dihubungkan dengan hukum berarti upaya menarik hukum dari al-Quran dan Sunnah dengan jalan *ijtihad*. *Istinbāt* hukum yaitu suatu cara yang dilakukan oleh pakar hukum (fikih) untuk mengungkapkan suatu dalil yang dijadikan dasar hukum.²⁴

Menurut Salam Madkur, secara garis besar ada dua macam perangkat atau metode yang dikembangkan oleh para ahli hukum Islam dalam rangka *istinbātnya* yang meliputi metode *istinbāt* yang dilakukan dengan cara menggali hukum kepada *naṣ* secara langsung dan metode yang dilakukan dengan cara menggali hukum dengan cara mengembalikan kepada *naṣ* secara tidak langsung, yaitu melalui kaidah-kaidah umum yang dikenal dengan *al-qawāid al-fiqhiyyah*.²⁵ Untuk jenis metode yang pertama, para ahli hukum Islam merumuskan tiga metode penemuan hukum yakni (1) metode interpretasi linguistik (*al-thurūq al bayāniyah*); (2) metode kausasi (*istinbāt al ta’līlī*); dan (3) metode *istinbāt istishlāhi*.²⁶ Sedang metode kedua dapat disebut dengan metode *istinbāt qawāid kulliyah*.

Menurut Mustafa al-Zarqa’ dimaksudkan dengan kaidah-kaidah fikih adalah kaidah yang bersifat umum, yang meliputi seluruh

²⁴Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177.

²⁵Muhammad Salam Madkūr, *Madkhal fi al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Dar Kitab Hadis, 1996), hlm. 275.

²⁶Ma’aruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*,... hlm. 44-46.

masalah-masalah fikih secara terperinci.²⁷ Fungsi dari kaidah-kaidah tersebut adalah untuk mengembalikan berbagai permasalahan *fiqhiyah* maupun menyelesaikan kasus-kasus baru yang bersifat cabang. Satria Effendi pula menggariskan bahwa metode *istinbāt* dapat dibagi kepada tiga bagian yaitu dari segi kebahasaan, dari segi *maqāsid* (tujuan) syari'ah dan segi harmonisasi beberapa dalil yang bertentangan.²⁸

1.5. Kajian Pustaka

Penelitian ini merupakan suatu penelitian keagamaan tentang hukum fikih yang merupakan satu kajian hukum yang memfokuskan kepada *uṣūl al-fiqh* sebagai metode dalam penetapan fatwa sesuai doktrin hukum Islam. Selanjutnya aplikasi beberapa metode lain seperti kumpulan kaidah syara' yaitu *qawāid al-fiqhiyyah* dan *maqāsid al-syari'ah* yang turut mendukung proses tersebut. Penelitian tentang fatwa ulama dalam wacana hukum Islam di Indonesia bukan suatu hal yang baru walaupun setiap satunya mempunyai dimensi dan pendekatan penelitian yang berbeda. Meskipun demikian, dengan adanya penelitian sebelumnya sebagai suatu referensi awal, ianya dapat dimanfaatkan dalam memahami proses dan metode *istinbāt hukum* dalam penetapan suatu fatwa keagamaan oleh sesebuah institusi fatwa.

Antara penelitian awal misalnya penelitian Muhammad Atho Mudzhar (1990), dalam desertasinya yang ditulis dalam bahasa Inggris berjudul *Fatwas of The Council of Indonesia Ulama: A. Study*

²⁷Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhāl al-Fiqhī al-Amm* (Damaskus: Dar Qalam, 2004), hlm 965.

²⁸Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*, hlm. 177.

of *Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988* (University of California Los Angeles-UCLA, 1990). Beliau menyimpulkan bahwa fatwa MUI memiliki 5 tipologi dan MUI dalam menetapkan fatwa konsisten berpedomankan kepada sumber hukum Islam yang utama serta secara metodologis menggunakan pendekatan *uṣūl al-fiqh*. Di samping metodologis tersebut, beliau juga berargumen bahwa sepanjang sejarahnya, fatwa MUI senantiasa berhubung rapat dengan beberapa faktor eksternal di antaranya faktor politik, sosiologis dan sebagainya.²⁹

Selanjutnya adalah artikel yang ditulis oleh Asjmuni Abdurrachman yang berjudul *Prosedur Penetapan Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional*.³⁰ Dalam artikel tersebut beliau menjelaskan bahwa DSN-MUI dalam menetapkan hukum menggunakan manhaj yang berpandukan kepada *naṣ-naṣ* yang utama yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Jika tidak didapati dari sumber tersebut maka disandarkan kepada *ijtihād* para ulama terdahulu yang terangkum dalam kitab-kitab fikih yang mu'tabar. Jika ditemukan pertentangan diantara pendapat para ulama tersebut maka akan disesuaikan dan diharmonisasikan. Apabila masih tidak mungkin dilakukan yang demikian maka dipilih yang dianggap lebih kuat dalil-dalil dan lebih kredibel diantara pendapat-pendapat yang ada. Untuk sebarang permasalahan baru (kontemporer) yang tidak ditemukan secara jelas keterangan *naṣ* mengenai hal tersebut serta tiada dalam hasil *ijtihād* para ulama terdahulu maka anggota DSN-MUI akan melakukan proses *ijtihād* secara kolektif berdasarkan pendekatan para ulama

²⁹Diterjemah ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* (Belanda: INIS, 1993)

³⁰Asjmuni Abdurrachman, "Prosedur Penetapan Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional", *Jurnal Al-Mawarid Edisi 18*, 2008, hlm. 173

terdahulu dan ulama terkemudian serta merayakan keperluan dan kemaslahatan ummat.

Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Zulqarnain yang berjudul *Penetapan Hukum Dalam Hukum Islam: Analisis Metodologi Pengambilan Hukum Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah*.³¹ Dalam kajiannya beliau cuba menjelaskan beberapa metode syara' yang dapat digunakan dalam merumuskan sesuatu hukum. Turut diteliti metode *istinbāṭ* yang telah digunapakai dalam penetapan fatwa mengenai pasar modal di Indonesia. Kemudian dijelaskan tentang sebagian metode tersebut, ada yang dapat diberlakukan secara tersendiri sesuai ketentuan syara' dan ada juga yang harus diaplikasikan dan diluaskan dengan metode lainnya. Adapun metode tersebut dibagikan kepada tiga metodologi yang utama yaitu metode *bayāni*, metode *qiyāsi* dan metode *taqrīri*.

Penelitian selanjutnya berbentuk penelitian komparatif antaranya karya ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Maksum yang berjudul *Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah*.³² Di dalam penelitian ini dijelaskan secara lengkap mengenai hal-hal penting tentang fatwa ekonomi syariah kontemporer. Beberapa tema yang diangkat dalam buku ini adalah bagaimana reaksi fatwa terhadap produk transaksi modern yang berhubungan dengan pengembangan akad, bagaimana proses pengembangan dan dinamika fatwa ekonomi syariah khususnya di Indonesia melalui organisasi MUI, di Malaysia melalui MPS-BNM dan beberapa organisasi lainnya yang berada di Timur Tengah. Kemudian diteliti bagaimana reaksi

³¹Zulqarnain, "Penetapan Hukum dalam Hukum Islam: Analisis Metodologi Pengambilan Hukum dalam Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah", *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 12, No. 1, 2012, hlm. 221.

³²Muhammad Maksum, *Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013)

fatwa terhadap produk-produk transaksi modern yang berbentuk kreasi produk-produk baru sebagai alternatif menjana pendapatan dan mengantisipasi praktek *riba*'.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Keberhasilan suatu penelitian cenderung ditentukan oleh metode dan pendekatan yang digunakan. Jika pendekatan yang digunakan dalam penelitian tidak tepat, maka penelitian itu menjadi tidak akurat dan kebenaran hasil penelitiannya dapat dipertanyakan. Demikian pula perbedaan pendekatan atas satu objek penelitian yang sama dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang berbeda.³³

1.6.1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif tentang hasil deskripsi dari objek-objek yang diamati dengan situasi yang diteliti. Penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu membaca atau meneliti buku-buku yang menurut uraiannya berkenaan dengan bahan kepustakaan.³⁴ Metode kajian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dengan teliti bahan-bahan kepustakaan yang tersedia seperti Al-Quran, kitab Hadits, kitab *turats* yang mu'tabar, pendapat ulama, naskah produk hukum seperti fatwa DSN-MUI dan resolusi MPS-BNM tentang *musyārahah*, serta hasil penelitian sebelumnya. Kemudian bahan-bahan tersebut diolah dan diteliti dengan cara

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 3.

³⁴Kartini Kartono, *Metodologi Sosial* (Bandung: Mandur Maju, 1991), hlm. 144.

diklasifikasikan, dikomparasikan, serta dianalisis untuk ditarik kesimpulannya.

1.6.2. Bahan yang Diteliti

Bahan penelitian terdiri dari bahan penelitian primer dan bahan penelitian sekunder yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Bahan penelitian sekunder adalah sumber data yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap data primer baik berupa buku yang ditulis oleh pendahulu, majalah, jurnal, makalah, lampiran akhbar, sumber internet dan lain sebagainya. Bahan penelitian primer kajian ini adalah Fatwa DSN-MUI dan Resolusi MPS BNM tentang *musyarakah*.

Di antara bahan penelitian sekunder kajian ini adalah *Buku Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanāqisah* oleh OJK, *Garis Panduan Musyarakah* oleh Bank Negara Malaysia, buku *Perkembangan Akad Musyarakah* oleh Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, buku *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* oleh KH Ma'aruf Amin serta buku *Hukum Perjanjian Syari'ah* oleh Syamsul Anwar. Selanjutnya kitab *Fiqh Islami* oleh Wahbah Zuhaili, buku *Bank Syariah Teori ke Praktik* oleh Syafi'i Antonio dan buku *Bank Islam: Analisis Keuangan dan Fikih* oleh Adiwarmarman Karim.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik studi dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian dan dengan cara meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Teknik kajian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder untuk kemudian dibaca, ditelaah, dan dianalisis. Selanjutnya dengan

cara mengumpulkan dan menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan yang relevan dengan tema kajian.³⁵

Melalui teknik pengumpulan data utama ini dilakukan penelitian terperinci keatas fatwa atau resolusi yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan MPS-BNM tentang *musyārahah* diikuti penggalian dokumentasi terhadap berbagai data yang dibutuhkan. Adapun data pendukung didapatkan melalui penggalian literatur yang relevan dengan topik persoalan yaitu fatwa tentang *musyārahah*. Data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara teliti kemudian dicari hubungan diantara masing-masing fatwa, selanjutnya dipadukan dapatkan tersebut sehingga terhasilmnya satu bentuk penelitian dan kesimpulan yang tersusun, sistematis dan utuh.

1.6.4. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif-komparatif yaitu sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.³⁶ Hal ini didapatkan dengan cara pengumpulan informasi dan bahan hukum dari kedua-dua sumber. Selanjutnya dilakukan perbandingan atas dua kelompok fatwa tersebut (fatwa DSN-MUI dan resolusi MPS BNM) sekitar masalah yang dibahas. Fatwa tersebut kemudian dipilah dan diperhatikan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan, lalu dikumpul, diteliti dan dilakukan analisa atas setiap dalil dan metode *istinbat al-hukmi* dari kedua-dua fatwa. Pada bagian akhir diolah dan ditentukan kesimpulan

³⁵Kartini Kartono, *Metodologi Sosial...*, hlm. 144.

³⁶Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 58.

atas pendapat yang dikaji hasil dari komparasi kedua-dua fatwa tersebut.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini terdapat empat bab yang diurutkan sesuai dengan standar aturan penulisan karya ilmiah supaya jelas, benar serta mudah dipahami terkait tema yang diteliti. Adapun sistematika penyusunan penulisan adalah sebagai berikut :-

Bab satu terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah penelitian dan rumusan masalah sebagai arah dan acuan dari keseluruhan penulisan serta ditegaskan dengan tujuan penulisan. Selanjutnya penjelasan istilah, kajian pustaka, serta metode penelitian baik jenisnya, sifat penelitian, pendekatan, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, pengolahan bahan hukum dan teknik analisa. Diakhiri dengan penjelasan sistematika pembahasan secara tersusun. Bab dua, akan mendeskripsikan tentang landasan teoritis pengertian dan keterangan mengenai konsep *musyārahah*, dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum *musyārahah*, macam-macam *musyārahah* dan pendapat para ulama tentang *musyārahah*. Kemudian dibahasakan mengenai *musyārahah* dalam konteks kontemporer.

Pada bab tiga akan dipaparkan mengenai sejarah dan profil DSN-MUI dan MPS-BNM, fatwa-fatwa DSN MUI dan MPS-BNM tentang *musyārahah*, latar belakang ditetapkan fatwa tentang *musyārahah*, dalil-dalil dan metode *istinbāt al-hukmi* yang digunakan dalam fatwa DSN-MUI dan MPS BNM dalam fatwa tentang *musyārahah*. Analisis keatas fatwa-fatwa tersebut antaranya analisis dalil-dalil, pemilihan metode *istinbāt* hukum dalam fatwa-fatwa DSN MUI dan MPS-BNM, serta relasinya dengan ketentuan-ketentuan

fatwa *musyarakah*. Bab keempat adalah kesimpulan terhadap segala permasalahan yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Juga saran yang dirasakan perlu bagi para pihak khususnya di bidang pengkajian dan pengawasan keuangan syariah serta masukan ilmiah bagi sebarang upaya penelitian lanjutan oleh para pengkaji lain di masa akan datang.

BAB II KONSEP MUSYARAKAH DALAM FIKIH MUAMALAH

2.1. Pengertian *Musyārahah*

Syarikah atau *syirkah* berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yaitu *syaraka* (شَرَكَ) - *yasyruku* (يَشْرُكُ) - *syirkan* (شَرِكٌ), *syarakah* (وَشَرَكَةٌ). Sedang *musyārahah* adalah kata terbitan yang juga berarti: sekutu atau teman peseroan, perkumpulan, perserikatan. Kalimat ini dapat ditemukan asalnya di dalam Al-Quran.³⁷ *Syirkah* secara etimologis berarti *ikhtilaf* yang mempunyai arti campur atau percampuran. Yang dimaksudkan dengan percampuran ini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta milik orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi.³⁸ Definisi *syirkah* menurut mazhab Maliki adalah suatu izin ber-*taṣarruf* (mengelola) bagi masing-masing pihak yang bersertifikat. Menurut mazhab Hanbali, *syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan *taṣarruf*. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.³⁹

Menurut Dewan Syariah Nasional, *musyārahah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih atas suatu usaha tertentu, dimana masing masing pihak saling memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan

³⁷Raghib Al-Isfahāni, *Mufradāt fi Gharib Al-Quran* (Suriah: Dār Qalam, 1991),hlm. 451. *Musyārakah* adalah *maṣdar* dari bentuk kata *syāraka* (شَرَكَ)
(يَشْرُكُ) (*yusyāriku*)

³⁸Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Mazāhib Al-Arba'ah*, Juz 3, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah,1990), hlm. 60.

³⁹Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),hlm. 192.

resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴⁰ Menurut Bank Indonesia *musyarakah* adalah perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁴¹

Perlu dijelaskan guna menghindari kekeliruan, secara umum menurut jumhur ulama', *syirkah* dibedakan menjadi dua yaitu: 1) *syirkah amlak* (kepemilikan), dan 2) *syirkah 'uqūd* (akad).⁴² *Syirkah amlak* yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa melalui akad *syirkah*. Kepemilikan bersama (*co-ownership*) dan keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atas suatu kekayaan (*asset*) tanpa telah membuat perjanjian kemitraan secara resmi atau tanpa ada akad atau perjanjian terlebih dahulu.⁴³

Syirkah amlāk terbagi menjadi dua bentuk yaitu *amlāk ijbāri* (paksa) dan *amlāk ikhtiāri* (sukarela). Bentuk pertama terjadi secara otomatis dan paksa yaitu tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya dan tiada alternatif untuk menolaknya seperti pemilikan harta secara bersama-sama yang disebabkan karena pewarisan.⁴⁴ Sedang bentuk kedua terjadi secara otomatis tetapi bersifat bebas yaitu tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya

⁴⁰Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2002 tentang *Musyarakah*

⁴¹Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2003*, Pasal 1.

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, (Kaherah: Fath 'Ilam Arabi, t.th),hlm. 202.

⁴³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Islam Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafitia, 1999),hlm. 58.

⁴⁴Rafiq Yunus al-Mishri, *Fiqh Muamalah Maliah* (Damaskus: Dar Qalam, 2005),hlm. 225.

serta wujud pilihan atau opsi untuk menolak seumpama dua orang atau lebih memperoleh hibah dari orang lain. Dalam kedua-dua bentuk *syirkah* ini bagian harta setiap orang yang berserikat sesuai dengan ketentuan haknya. Apabila masing-masing ingin bertindak hukum keatas harta serikat itu, maka harus ada izin dari mitranya, karena seseorang tidak memiliki kekuasaan atas bagian harta orang yang menjadi mitra serikatnya.⁴⁵

Dalam pembahasan skripsi ini hanya akan menfokuskan kepada *musyarakah* atau *syirkah 'uqūd* yaitu suatu perkongsian berasaskan akad. Menurut jumhur ulama seperti dinyatakan oleh Ibnu Rusyd, perkongsian ini terdiri daripada empat macam yaitu *syirkah 'inān*, *syirkah mufāwadah*, *syirkah abdān* (keterampilan) dan *syirkah wujūh* (reputasi/*good will*).⁴⁶ Hanya saja ulama Hanafiyyah membagikan *syirkah uqud* ini kepada tiga macam yaitu *syirkah amwāl*, *syirkah abdān*, dan *syirkah wujūh*. Dari ketiga jenis tersebut masing-masing dibedakan lagi berdasarkan porsi penyertaan modal dan kesetaraan para pihak baik dalam bentuk *syirkah 'inān* atau *syirkah mufāwadah*.⁴⁷

Musyarakah termasuk kedalam akad *tijārah* (akad bertujuan komersial) dengan pola kemitraan (*isytirāk*) dan bagi hasil. Yang dimaksudkan dengan akad disini menurut para fuqaha adalah perikatan yang ditetapkan melalui *ijāb* dan *qabūl* berdasarkan ketentuan syarak yang menimbulkan akibat hukum terhadap

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muāmalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 168.

⁴⁶ Ibnu Rusyd Al-Qurtubi, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyah Muqtasid* (Riyadh: Dar Ifkar Dualiah, 2009), hlm. 778.

⁴⁷ Tim Penyusun, *Buku Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanāqishah* (Jakarta: OJK, 2016), hlm. 9.

objeknya.⁴⁸ Ia juga dapat diartikan pertemuan *ijāb* dan *qabūl* yang dibenarkan syara', dan sebagai pernyataan kehendak dua pihak.⁴⁹ Pendapatan atau keuntungan dari akad ini dibagi antara para pihak sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.

Menurut penulis *syirkah uqūd* atau *musyārahah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama. Manakala keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai dengan perjanjian. Demikian juga perlu ditegaskan bahwa kalimat *musyārahah* atau *syirkah* yang dimaksudkan di dalam penulisan ini sama-sama bermaksud perkongsian berasaskan akad kerjasama oleh para pihak. Dalam hal ini, kebanyakan kitab fikih baik kitab fikih klasik, fikih kontemporer, fikih komparatif maupun fikih muamalah sering mengguna pakai istilah *syirkah* secara luas. Antaranya seperti yang terdapat di dalam kitab *Al-Mughni*, *Bidāyatul Mujtahid*, *Fiqh Sunnah* dan *Fiqh Islami*.

Sedangkan penggunaan kalimat *musyārahah* sering ditemukan dalam literatur ekonomi dan keuangan Islam modern terutama dalam bidang perbankan Syariah. Istilah ini juga dapat ditemukan dalam fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh badan penasihat dan pengawas lembaga keuangan Islam seperti fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan *musyārahah* dan *musyārahah mutanāqisah*, Resolusi Majlis Penasihat Syariah Malaysia tentang *musyārahah*, Resolusi Suruhanjaya Sekuriti Malaysia tentang *musyārahah mutanaqisah* dan lain sebagainya.

⁴⁸Rachmad Syafie, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 44.

⁴⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 58.

2.2. Dasar Hukum *Musyārahah*

Landasan dasar hukum *al-musyārahah* seperti yang telah dibawakan oleh Wahbah Zuhaili adalah berdasarkan dalil Al-Quran, hadits dan *ijma'* antaranya :⁵⁰

2.2.1. Al-Qur'an :

Melalui ketetapan dalam Surah Al-Nisā' ayat 12 Allah SWT berfirman :

قوله سبحانه وتعالى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya : “ *Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga* “. [QS. Al-Nisā (4):12]

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Shād ayat 24:

قوله جل وعلا: "...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ..."

Artinya : “ *Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu ituberbuat zalim kepada yang lain kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu* “. [QS.Al-Sād (38):24]

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenanan dan pengakuan Allah akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat Al-Nisā' ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis karena waris, sedangkan dalam surat Al-Shād ayat 24 terjadi atas

⁵⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz 4, (Damaskus: Darul Fikr,1985),hlm. 793.

dasar akad (transaksi).⁵¹ Dua ayat ini juga dinyatakan oleh Ibnu Qudamah didalam kitabnya *Al-Mughni* sebagai landasan *syirkah*. Selain dua ayat yang telah disebutkan, menurut Rasyad Hassan Khalil, di dalam Al-Quran masih lagi terdapat beberapa ayat lain mengenai *syirkah* secara umum antaranya dalam Surah Al-Baqarah ayat 220, Surah Al-Anfal ayat 41 dan dalam Surah Al-Rum ayat 28.⁵²

2.2.2. Al-Hadits :

Terdapat beberapa hadits yang menjadi sandaran para ulama ketika membenarkan akad ini selain daripada ayat-ayat Al-Quran yang telah disebutkan diatas. Antaranya oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Hajar al-Asqalāni dan Wahbah Zuhaili di dalam kitab mereka. Diantara hadits tersebut adalah seperti berikut :-

Dalam sebuah hadits Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A:

الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه السلام قال " إن الله عز وجل يقول:

أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا" رواه أبو داود .

Artinya : *Dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW telah bersabda : "Allah SWT telah berfirman : Aku menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka Aku keluar dari penyertaan tersebut". (HR. Abu Daud Hadis No.3383).*⁵³

⁵¹ Abdul ‘Aziz Khayyat, *Al-Syarikāt fī al-Syariat al-Islamiyah wa Qānun*, Juz 1, (Beirut: Muassasah Risalah, 1994), hlm. 59.

⁵² Rasyad Hasan Khalil, *Al-Syarikāt fī al- Fiqh al- Islami Dirasah Muqaranah* (Riyadh: Dar Rasyid, 1981), hlm. 18-20.

⁵³ Abu Daud Sulaiman bin ‘Asy’as Al-Sajastani, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Dar Ashriah, t.t), hlm. 256. Lihat juga Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Marām min adillah al- Ahkām* (Mesir: Dar Salam, 2008), hlm. 256. Hadis ini tidak dikomentari oleh Abu Daud (Statusnya *ṣalih* (baik) disisinya).

Menurut Al-Shan'ani artinya bahwa Allah SWT bersama mereka berdua memelihara, merawat, memberikan pertolongan pada harta mereka, dan menurunkan berkah pada perdagangan mereka. Jika terjadi pengkhianatan, maka keberkahan hartanya akan hilang. Hadis ini memberi dorongan untuk berserikat (bersekutu) dengan tanpa pengkhianatan, juga memberikan pencegahan atas pengkhianatan dalam berserikat.⁵⁴ Hadis ini dinilai sahih sanadnya oleh Al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (Hadits No. 2369).

Sejalan dengan hadis yang telah disebutkan diatas adalah hadis riwayat Imam al-Daruquthni :

وقال عليه السلام : "يُدُّ اللَّهُ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ رَفَعَهَا عَنْهُمَا. سنن الدارقطني .

Artinya : ”Rahmat Allah SWT tercurahkan atas dua pihak yang sedang berserikat selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat, maka bisnisnya akan tercela dan keberkatan pun akan hilang daripadanya”. (HR. Daruquthni : No. 2934 - Hadis Mursal).⁵⁵

Dalam hadis lain dari al-Sāib bin Yazid al Makhzumi R.A :

وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ الْمُخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْبِعْثَةِ فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: "مَرْحَبًا بِأَجِي وَشَرِيكِي" زَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

⁵⁴Muhammad bin Ismail al-Shan'ani, *Subulussalam Syarh Bulugh Maram*, Juz 3, (Riyadh: Maktabah Nizar Musthofa, 1995), hlm. 1190.

⁵⁵Ali bin Umar bin Ahmad Al-Daruquthni, *Sunan Daruquthni* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2004), hlm 443. Juga: Muhammad 'Ali al-Syaukani, *Nailul Author*, Juz 5, (Mesir: Dar Hadis, 1993), hlm. 315. Hadis *mursal* adalah hujjah disisi 'aimmah *mazāhib* kecuali Imam Syafi'i yang menerima dengan beberapa syarat.

Artinya :”*Dari As-Sa’ib bin Yazid Al-Makhzumi R.A., bahwa ia adalah teman persekutuan Nabi SAW sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rasul. Lalu Nabi SAW datang pada hari Fathu Makkah dan berkata: “Selamat datang saudaraku dan teman persekutuanmu”. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibn Majah – Sahih Lighairihi).*⁵⁶

Ibnu Abdul Barr berkata: ia adalah diantara orang yang bagus keislamannya. Ia dikurniai umur panjang dan hidup hingga masa Mu’awiyah R.A. As-Sa’ib adalah teman persekutuan Nabi SAW di awal masa Islam dalam perdagangan. Ketika Fathu Makkah Nabi SAW bersabda: “*Selamat datang saudara dan teman persekutuanmu, ia tidak bertengkar dan tidak pula berselisih (yakni seorang yang berlemah lembut).*” Hadis ini dianggap sahih oleh Al-Hakim.⁵⁷

Menurut Al-Shan’ani hadis ini menjadi dalil bahwa *syirkah* sudah sedia ada sebelum Islam, dan Islam memperakukan perbuatan tersebut.⁵⁸ Hadits-hadits yang intinya menunjukkan legalitas akad *syirkah* tidak hanya terbatas pada hadits yang telah disebutkan diatas. Hanya saja dalam skripsi ini penulis membawakan tiga hadits mengenai *syirkah* yang mempunyai persamaan dan hubungan. Ketiga-tiganya sering kali dijadikan sebagai sandaran akad *syirkah*, sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fikih seperti kitab *Al-Mughni*

⁵⁶Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dar Ihya’ Turats, 1993), *Musnad Makkiyyin*, Hadis No. 15079, Abu Daud Sulaiman bin ‘Asy’as Al-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, Juz 3...hlm. 260. Hadis No. 4836. Muhammad bin Yazid al-Qazwīni, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, (Mesir: Dar Ihya’ Kutub, t.t),hlm. 768, Hadis No. 2287. Lihat juga Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Marām min adillah al-Ahkām*...,hlm. 256

⁵⁷‘Abdullah Yusuf Al-Zaylai’, *Nasb Al-Rayah li Ahadits Hidayah*, Juz 4,(Mesir: Dar Hadis, 1995), hlm.388. Lihat juga *Al-Mustadrak ‘ala al-Shahihain* oleh Muhammad bin ‘Abdullah Al-Hakim Al-Naisaburi, (Beirut: Dar Ma’arifah, 1998), hlm. 374, No. 2404.

⁵⁸ Muhammad bin Ismail al-Shan’ani, *Subulussalam Syarh Bulugh Maram*...,hlm. 1194.

oleh Ibnu Qudamah, *Bulugh Maram* oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fiqh Sunnah* oleh Sayyid Sabiq dan *Fiqh Islami* oleh Wahbah Zuhaili.

2.2.3. *Ijma'*

Ibnu Munzir al-Naisaburi di dalam kitabnya *Al-Ijma'* menjelaskan bahawa ulama' telah sepakat mengenai kebolehan usaha dengan akad *syirkah*.⁵⁹ Demikian juga menurut Ibn Qudamah di dalam kitabnya *Al-Mughni*. Beliau berkata : "Kaum Muslimin telah bersepakat akan legitimasi *musyārahah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat terdapat dalam beberapa elemen daripadanya".⁶⁰

2.3. Macam-macam *Musyārahah*

Syirkah 'uqūd atau *musyārahah* yang menjadi fokus skripsi ini adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan.⁶¹ Mengenai pembagian *syirkah 'uqūd* ini para ulama' berbeda pendapat. Ibnu Rusyd menyatakan bahawa *syirkah* ini secara umumnya dibagikan kepada empat jenis yaitu *syirkah 'Inān*, *syirkah Mufāwahdah*, *syirkah Abdan* dan *syirkah Wujūh*. Para ulama' bersepakat dalam keabsahan *syirkah 'Inān* akan tetapi berbeda pendapat dalam hal mengharuskan bentuk *syirkah* yang lain.⁶²

Adapun pembagian *syirkah* dan hukumnya menurut setiap mazhab seperti berikut :-

⁵⁹Ibnu Munzir, *Al-Ijmā'* (Ajmān: Maktabah Furqan, 1999), hlm. 137.

⁶⁰Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 7, (Riyadh: Dar A'lim Kutub, 1997), hlm. 109.

⁶¹Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Mazāhibil al-Arba'ah*..., hlm. 60.

⁶²Ibnu Rusyd Al-Qurtubi, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyah Muqtasid*..., hlm. 778.

a. Ulama' Hanabilah membaginya kepada lima bentuk atau jenis yaitu: *Syirkah 'Inān, Mufawāḍah, Abdān, Wujūh* dan *Muḍārabah*.⁶³

Kesemuanya dibolehkan kecuali *syirkah Mufāwadah*.

b. Ulama' Mālikiyah membaginya menjadi empat yaitu: *Syirkah 'Inān, Mufāwāḍah Abdān* dan *Wujūh*. *Mufāwadah* yang diizinkan mereka berbeda daripada definisi dan syarat-syarat Hanafiyah.⁶⁴ Sedang menurut Malikiyah *syirkah Wujūh* tidak dibolehkan.

c. Ulama' Syafi'iyah membagikan *syirkah* kepada empat macam seperti yang disepakati jumbuh ulama'. Akan tetapi mereka hanya membenarkan *syirkah 'Inan*.⁶⁵

d. Ulama' Hanāfiyah membaginya kepada tiga yaitu :

Syirkah Al-Amwāl (perserikatan modal atau harta), *Syirkah Al-'Amāl* (perserikatan dalam kerja), dan *Syirkah Al-Wujūh* (perserikatan tanpa modal). Pada ketiga-tiganya dapat berlaku ketentuan '*Inan* atau *Mufāwāḍah* berdasarkan faktor kesetaraan atau tidak bentuk kontribusi oleh para pihak yang saling berkongsi. Menurut Hanafiyah kesemua jenis *syirkah* dibenarkan jika telah terpenuhi syarat-syaratnya.⁶⁶

Berikutnya dijelaskan pengertian tentang istilah dan macam-macam *syirkah* disisi para ulamayang harus diketahui ketika membahaskan mengenai *Syirkah 'Uqūd* :

(1) *Syirkah Al-Amwāl*

⁶³Isa 'Abduh, *Uqūd al- Syari'yyah al-Hākimah li Muamalāt Maliah al-Mua'asirah* (Mesir: Dar al-I'thiṣom, 1977),hlm. 62.

⁶⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh...*,hlm. 795-800.

⁶⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*,hlm. 204.

⁶⁶Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Mazāhibil al-Arba'ah...*, hlm. 63.

Adalah persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.⁶⁷

(2) *Syirkah Al-Mufāwāḍah*

Adalah sebuah persekutuan dua pihak pemodal atau lebih dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.⁶⁸

(3) *Syirkah Al-‘Inān*

Adalah sebuah persekutuan dua pihak pemodal atau lebih dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.

(4) *Syirkah Al-‘Amāl* atau *Syirkah Abdān*

Adalah persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka.⁶⁹ Jadi *syirkah* dalam bentuk ini adalah kesepakatan untuk sama-sama melakukan suatu jenis pekerjaan.

(5) *Syirkah Al-Wujūh*

Adalah persekutuan antara dua pihak pengusaha atau lebih untuk melakukan kerjasama suatu usaha dimana masing-masing pihak

⁶⁷Nazih Hammad, *Mu’jam Mustolahāt Maliah wa al-Iqtisodiah*(Damaskus: Dar Qalam, 2008),hlm. 263.

⁶⁸Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*,hlm. 195.

⁶⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*,hlm. 204.

sama sekali tidak menyertakan modal dan menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan dari pihak ketiga.⁷⁰

(6) *Syirkah Al-Muḍārabah*

Adalah persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berbisnis atau pengusaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan kata lain perserikatan antara modal pada satu pihak, dan pekerjaan pada satu pihak yang lain.⁷¹ Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. Akan tetapi pengolongan *muḍārabah* ke dalam macam-macam *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama yaitu diantara ulama Hanabilah dan jumhur ulama' yang membedakan akad ini dengan *musyārahah*.

Menurut Hanabilah, *muḍārabah* dapat dikatakan sebagai *syirkah*.⁷² Ini terjadi apabila memenuhi syarat-syaratnya seperti pihak-pihak yang berserikat cakap dalam bertindak sebagai wakil, modalnya berbentuk uang tunai, jumlah modal jelas, diserahkan langsung kepada pekerja (pengelola) dagangan itu setelah akad disetujui dan pembagian keuntungan diambil dari hasil perserikatan itu bukan dari harta yang lain. Dalam hal ini penulis cenderung terhadap pendapat yang memisahkan perbahasan akad *muḍārabah* sebagai jenisnya yang tersendiri. Dalam penelitian ini, perbedaan antara keduanya yaitu *musyārahah* dan *muḍārabah* akan dijelaskan sesudah keterangan tentang *musyārahah mutanāqishah*.

⁷⁰Ibn Rusyd Al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Muqtasid*..., hlm. 781.

⁷¹Rafiq Yunus al-Mishri, *Fiqh Muamalah Maliah*..., hlm. 228.

⁷²Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*..., hlm. 795.

2.4. Rukun dan Syarat *Musyārahah*

2.4.1 Rukun *Musyārahah*

Rukun *musyārahah* diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Hanafiyah hanya terdapat satu rukun yang menjadi inti dari *musyārahah*, yaitu *ijāb* dan *qabūl*.⁷³ Sedangkan *al-‘aqidāni* dan *mahallul ‘aqd* bukan merupakan rukun akad melainkan lebih tepat untuk dinyatakan sebagai syarat akad.⁷⁴ Pendapat seperti ini didasarkan pada pengertian rukun sebagai sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu, sedangkan ia bersifat internal (*dākhily*) dari sesuatu yang ditegakkannya. Sedangkan pendapat *jumhūr* ulama seperti yang dijelaskan oleh ‘Abd Rahman al-Jaziri, secara umumnya rukun akad terdiri dari tiga rukun yaitu *sighah* (*ijāb* dan *qabūl*), *al-‘aqidān* (para pihak yang berkontrak/berserikat), dan *mahallu al-‘aqd* (objek kesepakatan) yang terdiri dari dana dan kerja.

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer seperti Mustafa al-Zarqa’ dan Wahbah Zuhaili, rukun yang membentuk akad ada empat yaitu *sighah* (*ijāb* dan *qabūl*), *al-‘aqidain* (para pihak yang berkontrak/berserikat), *mahallu al-‘aqd* (objek kesepakatan) serta *maudhu’ al-‘aqd* (tujuan akad).⁷⁵ Penjelasan rukun serta ketentuan bagi rukun-rukun tersebut adalah seperti berikut :⁷⁶

1. *Sighah* (ucapan) *ijāb* dan *qabūl* (penawaran dan penerimaan)

Tidak ada penentuan bentuk khusus dari kontrak *musyārahah* secara umum. Ianya dapat berbentuk pengucapan maupun gerak yang menunjukkan tujuan para pihak yang berakad. Akad dianggap sah jika

⁷³ Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh ‘Ala Mazāhibil al-Arba’ah...*, hlm. 71.

⁷⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 127.

⁷⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh...*, hlm. 182.

⁷⁶ Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh ‘Ala Mazāhibil al-Arba’ah...*, hlm. 71.

diucapkan secara lisan maupun tulisan yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Akad kontrak *musyarakah* dicatat dan disaksikan.

2. Al- 'Aqidān (Pihak yang berkontrak)

Pihak yang berkontrak disyaratkan orang yang berakal sehat, mencapai umur *baligh*, bertindak atas kehendak sendiri (tanpa ada paksaan lain) dan harus kompeten dalam memberikan atau menerima kekuasaan perwakilan.⁷⁷ *Ijāb* dan *qabūl* yang tidak ada substansinya, hampa dari perizinan, justeru tidak dapat menciptakan perjanjian yang sah secara hukum. Izin itu sendiri mengandaikan adanya kehendak. Orang yang tidak mempunyai kehendak tidak memiliki perizinan, seperti orang gila, hilang akal, anak yang belum *mumayyiz*. Ini karena akad pada dasarnya merupakan tindakan hukum yang berlandaskan pada kehendak untuk melahirkan akibat hukum.⁷⁸

3. Objek kesepakatan: Dana dan Kerja⁷⁹

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Sebagian ulama memberi kebenaran jika modal berwujud dalam bentuk aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, perlengkapan dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Akan tetapi dalam hal yang demikian seluruh modal tersebut harus dinilai dahulu secara tunai dan disepakati secara bersama oleh para mitra. Secara umumnya partisipasi para (kerja) pihak yang bermitra dalam

⁷⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyyah wa Nazhariyah al-'Aqd fi Syāri'ah Islamiyah* (Kaherah: Dar Fikr Arabi : 1996), hlm. 261.

⁷⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 124.

⁷⁹ Tim Penyusun, *Islamic Financial System Principles and Operations* (Malaysia: ISRA, 2012), hlm. 249.

pekerjaan *musyarakah* harus ada dalam akad ini. Namun, tidak ada keharusan mereka untuk menanggung beban kerjasama secara sama rata. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.⁸⁰

Dalam akad juga dikenal adanya hukum akad yaitu akibat hukum yang timbul dari akad. Ianya dapat dibedakan lagi menjadi dua macam yaitu hukum pokok akad dan hukum tambahan akad. Yang dimaksud dengan hukum pokok akad adalah akibat hukum yang menjadi maksud dan tujuan bersama yang hendak direalisasikan oleh para pihak melalui akad sedangkan hukum tambahan akad adalah hak dan kewajiban yang timbul dari akad. Tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syari'ah yang diinginkan dari akad tersebut.⁸¹

Suatu perjanjian sah jika tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya, saling ridha, tanpa paksaan antara para pihak, serta butiran perjanjian tertuang dengan jelas dan gamblang. Jika tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah. Apabila para pihak melakukan perikatan dengan tujuan yang berbeda, salah satu pihak memiliki tujuan yang bertentangan dengan syara' dan diketahui pihak lainnya, maka hukum perikatan itu akan menjadi haram. Contohnya perserikatan usaha guna mendapatkan keuntungan melalui aktifitas jual-beli khamar.

⁸⁰DSN MUI, *Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah...*, hlm. 3.

⁸¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 207.

2.4.2. Syarat-syarat *Musyārahah*.

Terdapat syarat-syarat tertentu baik berlaku secara umum maupun secara khusus yang harus dipenuhi agar *musyārahah* menjadi sah pada saat melakukan perjanjian. Sebagian syarat tersebut berlaku untuk semua jenis *syirkah 'uqūd* dan sebagian lagi bersifat khusus untuk jenis tertentu seperti dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, Abdul Rahman Al-Jaziri dan Ibnu Rusyd di dalam kitab mereka. Disini akan dijelaskan syarat-syarat tentang *musyārahah uqūd*, *musyārahah amwāl*, *musyārahah mufāwāḍah*, *musyārahah 'inan*, *musyārahah 'amāl* dan *musyārahah wujūh*. Keterangan syarat-syarat setiap *musyārahah* tersebut adalah seperti berikut :

1. Syarat *musyārahah al-'uqūd*⁸²

Menurut para ulama syarat-syarat *syirkah 'uqūd* terdiri dari tiga syarat yang berisi tentang *wakālah* dan pembagian keuntungan. Hal tersebut kemudian dijelaskan oleh Abdul Rahman al-Jaziri dan Wahbah Zuhaili seperti berikut:⁸³

a. Persyarikatan yang berlaku merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Apabila salah satu pihak jika melakukan tindak hukum terhadap objek perserikatan (dengan izin anggota lainnya), maka dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat. Hal ini karena keuntungan yang dihasilkan dari aktifitas bisnis adalah milik perserikatan, dan hanya akan menjadi milik bersama para anggotanya jika masing-masing pihak berhak mewakili kelompok, baik dalam hal modal maupun aktifitas.

⁸² Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Mazāhibil al-Arba'ah*..., hlm. 73.

⁸³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*..., hlm. 805.

b. Persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan dan diketahui dengan jelas ketika berlangsungnya akad. Ketentuan ini merupakan hal penting, karena penentuan keuntungan termasuk dalam ruang lingkup objek akad. Tiadanya kejelasan dalam penetapan terkait dengan objek akad (keuntungan) akan menyebabkan rusaknya akad.

c. Keuntungan merupakan bagian dari harta perserikatan. Akad *musyarakah* akan rusak manakala keuntungan yang menjadi hak masing-masing diambil dari harta lain milik satu atau beberapa anggota, karena akad menghendaki adanya kepemilikan bersama dalam keuntungan, milik satu atau beberapa anggota.

2. Syarat *musyarakah al-amwāl*

Selanjutnya terdapat dua syarat yang menyangkut ketentuan *syirkah amwal* menurut Wahbah Zuhaili, Abdul Rahman al-Jaziri dan Ibnu Rusyd yaitu :

a. Harta yang menjadi modal, merupakan harta yang telah berada ditangan, bukan harta yang dipegang pihak lain, seperti piutang atau tidak jelas keberadaannya, baik ketika memulai akad maupun ketika pelaksanaan usaha. Hal ini karena tujuan *musyarakah* adalah untuk memperoleh keuntungan dan hanya bisa dicapai dengan usaha, sedangkan usaha membutuhkan modal yang riil untuk berjalan, Ini adalah pendapat jumhur ulama sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Rahman al-Jazairi.⁸⁴

Menurut Wahbah Zuhaili, modal secara riil hanya disyaratkan pada saat aktifitas bisnis berlangsung, bukan pada saat akad, karena

⁸⁴ Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Mazāhibil al-Arba'ah...*, hlm. 73.

inti utama dalam kerjasama yang berorientasikan keuntungan adalah pada kegiatannya bukan pada akadnya.⁸⁵

Mengenai keharusan pencampuran modal para pihak, *jumhūr* ulama' seperti dikatakan oleh Ibnu Rusyd tidak mensyaratkan hal demikian karena akad *musyārahah* hakikatnya telah terwujud dengan berlakunya akad. Sedang ulama Syafiiyyah mensyaratkan percampuran modal para pihak harus percampuran secara sempurna mulai sebelum dilakukan akad lagi. Ini karena menurut mereka hakikat *musyārahah* berarti percampuran, dan hal tersebut belum terwujud selagi mana kedua harta tersebut masih dapat dibedakan. Kedua, konsekuensi kerusakan *musyārahah* akan ditanggung secara bersama karena modalnya telah menyatu. Sedangkan jika percampuran belum dilakukan dan dapat dibedakan, maka kerusakan ditanggung pemiliknya sendiri dan hal ini bertentangan dengan konsekuensi *musyārahah* pada umumnya. Dalam hal ini yang utama dan lebih baik adalah melakukan percampuran secara sempurna⁸⁶

b. Menurut *jumhur* ulama harta yang dikeluarkan oleh para pihak untuk dijadikan modal adalah berupa barang berharga secara mutlak seperti dinar, dirham dan uang, bukan bentuk barang komoditas dagangan yang hanya sekadar memiliki kesamaan nilai tetapi tidak memiliki kesamaan aspek riil.⁸⁷

Hal ini untuk menghindari perbedaan nilai yang terkandung dalam suatu barang, karena perbedaan jenis dan macamnya dan perbedaan nilai yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi.

⁸⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh...*, hlm. 805.

⁸⁶ Ibn Rusyd Al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Muqtasid...*, hlm. 779.

⁸⁷ Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Mazāhibil al-Arba'ah...*, hlm. 73.

Sehingga menyebabkan timbul kesulitan kalkulasi kontribusi yang disumbang oleh masing-masing anggota dan pada akhirnya mengakibatkan kesulitan ketika dilakukan kalkulasi keuntungan untuk tiap anggota.⁸⁸ Ulama Malikiyah membenarkan modal *musyarakah* baik dalam bentuk barang berharga secara mutlak maupun komoditas dagangan dengan syarat ianya harus diukur sesuai dengan harganya. Dengan demikian menurut mereka faktor kejelasan dalam hal modal *musyarakah* telah terpenuhi.

3. Syarat *musyarakah al-mufāwāḍah* dan *musyarakah 'inān*

Mengenai syarat-syarat *musyarakah al-mufāwāḍah* para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan jumlah syarat-syaratnya. Wahbah Zuhaili menyebut bahawa terdapat 6 syarat sahnya sedang Abdul Aziz Khayyat dan 'Isa Abduh menyenaraikan dengan jumlah yang berbeda. Tetapi jika diteliti, syarat-syarat tersebut adalah sama menurut penetapan ulama Hanafiyyah dan Zaidiyyah dan perbedaan jumlah tersebut hanyalah karena pembagian semata-mata, dan bukannya pada substansinya.⁸⁹

a. Para pihak memiliki kecakapan dan kompeten untuk menjadi wakil dan penjamin, karena setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang setara. Setiap dari mereka berhak bertindak hukum terhadap seluruh objek perserikatan. Tidak boleh satu pihak menangani hal tertentu sementara yang lain hanya menangani hal lain.⁹⁰

b. Modal harus sama ukuran dan nilainya dari awal hingga berakhirnya *musyarakah*, karena prinsip yang dijadikan dasar dalam

⁸⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh...*, hlm. 806.

⁸⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh...*, hlm. 811.

⁹⁰ 'Isa 'Abduh, *Uqūd al-Syari'yyah al-Hākimah li Muamalāt Maliah al-Mua'asirah...*, hlm. 66

musyarakah ini adalah kesamaan. Modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota tidak diharuskan untuk sejenis, selama nilainya sama seperti emas dan perak, sedangkan modal menjadi hak milik perserikatan.⁹¹

c. Keuntungan yang diterima setiap anggota harus dalam jumlah sama, karena pihak yang berserikat mengeluarkan modal, memikul tanggungjawab dan melakukan kerja yang memberikan kontribusi terhadap terhasilnya keuntungan berdasarkan kapasitas yang sama.

d. Aktifitas yang menjadi kegiatan perserikatan merupakan aktifitas dalam bidang yang bolehdilakukan menurut masing-masing anggota, sehingga tidak wujudnya perlakuan khusus karena adanya perbedaan tertentu.⁹²

e. Akad menggunakan lafaz khusus *mufāwāḍah* atau yang semakna dengannya. Syarat-syarat yang telah dinyatakan ini merupakan hal yang harus dipenuhi, jika tidak, maka para ulama sepakat akadnya tidak dianggap sebagai akad *musyarakah mufāwāḍah* akan tetapi menjadi *musyarakah 'inān*⁹³

Hal ini karena inti dari *musyarakah mufāwāḍah* mengharuskan kesetaraan kontribusi dan nisbah keuntungan para pihak sedangkan *musyarakah 'inān* tidak mensyaratkan hal yang demikian.⁹⁴

⁹¹ Abdul Aziz Khayyat, *al-Syarikat fi al-Syariat Islamiah wa Qānun*, Juz 2..., hlm. 24.

⁹² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*..., hlm. 811.

⁹³ Abdul Aziz Khayyat, *al-Syarikat fi al-Syariat Islamiah wa Qānun*, Juz 2..., hlm. 34.

⁹⁴ Ali Khafif, *Al-Syarikāt fi Fiqh Islāmī Buhuts Muqāranah* (Kaherah: Dar Fikr Arabi, 2009), hlm. 78.

4. Syarat *musyarakah wujūh* dan ‘*amāl*

Selanjutnya syarat-syarat *musyarakah wujūh* dan ‘*amāl* seperti dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili menurut Hanafiyyah dapat berbentuk *mufāwāḍah* atau ‘*inān*. Pada *musyarakah wujūh* yang berbentuk *mufāwāḍah*, maka setiap anggota harus memiliki kemampuan untuk menjadi wakil yang mewakili perserikatan, bertanggungjawab terhadap jual-beli, penjualan barang komoditas dan mendapatkan keuntungan. Jika *musyarakah wujūh* berbentuk *inān*, maka syarat-syarat dengan prinsip persamaan di atas tidak diberlakukan. Butiran ketentuan dalam perserikatan ini merupakan hasil kesepakatan sepenuhnya orang yang berserikat. Menurut Hanafiyyah pada *musyarakah al-‘amāl* yang berbentuk *mufāwāḍah*, syarat-syarat yang berlaku sebagaimana pada syarat *mufāwāḍah* pada umumnya, sedangkan bila berbentuk *inān*, syarat yang harus dipenuhi hanyalah satu, yaitu setiap anggota memiliki kemampuan dan kelayakan untuk mewakili perserikatan.⁹⁵

Menurut ‘Abdul ‘Aziz Khayyat, berbeda dengan Hanafiyyah dan Hanabilah, Malikiyyah mensyaratkan dalam *syirkah ‘amāl* tiga hal yaitu persamaan profesi atau dua profesi yang saling berhubungan. Kedua adalah persamaan tempat bekerja para pihak dan yang ketiga adalah terhasilnya hubungan dan kerjasama tolong menolong diantara para pihak.⁹⁶ Mengenai pencantuman syarat-syarat tambahan lain pada akad, pada dasarnya segala klausul yang dimasukkan ke dalam akad menjadi sah apabila pemasukannya syarat tersebut tidak

⁹⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*..., hlm. 813.

⁹⁶Abdul Aziz Khayyat, *Al-Syarikat fi al-Syariat Islamiah wa Qānun*, Juz 2..., hlm. 44.

mengakibatkan terjadinya pertentangan syarat-syarat dengan kemaslahatan umum atau nilai kesusilaan yang telah digariskan oleh hukum syara'. Apabila syarat yang bertentangan tersebut tetap dimasukkan atau dicantumkan ke dalam suatu akad, maka syarat tersebut itu dipandang sebagai tidak ada (sia-sia)⁹⁷

2.4. Berakhirnya Akad *Musyārahah*

Akad *musyārahah* adalah suatu bentuk akad *musammā* yang bersifat *jāiz* menurut jumhur ulama' seperti dinyatakan oleh Ibnu Rusyd dan bukannya akad *lāzim*. Salah satu pihak dapat membatalkan akad ini atau mengundurkan diri secara sepihak meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya.⁹⁸ Menurut Abdul Aziz Khayyat terdapat tujuh sebab khusus dan lima sebab umum berakhirnya suatu *musyārahah*.⁹⁹ Rasyad Hasan Khalil berpendapat terdapat tujuh hal yang menyebabkan berakhirnya akad ini.¹⁰⁰ Sedang menurut Wahbah Zuhaili wujud empat sebab umum dan dua sebab khusus yang menyebabkan batalnya *musyārahah*.¹⁰¹ Muhammad Taqi Uthmani menyebutkan bahwa hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad ini kepada tiga sebab utama.¹⁰² Sebab-sebab yang telah dinyatakan oleh para ulama tersebut jika dirangkumkan secara keseluruhannya adalah seperti berikut :-

⁹⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 214.

⁹⁸Ibnu Rusyd Al-Qurtubi, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyah Muqtasid...*, hlm. 782.

⁹⁹Abdul Aziz Khayyat, *Al-Syarikat fi al-Syariat Islamiah wa Qānun*, Juz 1..., hlm. 345-346.

¹⁰⁰Rasyad Hasan Khalil, *Al-Syarikāt fi al-Fiqh al-Islami Dirasah Muqaranah...*, hlm. 93.

¹⁰¹Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh...*, hlm. 829.

¹⁰²Muhammad Taqi Uthmani, *An Introduction to Islamic Finance* (USA : Kluwer Law, 2002), hlm. 11.

- a. Salah satu pihak membatalkannya (mengundurkan diri) atau para pihak sepakat untuk membubarkannya.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertaşarruf* (keahlian mengelola harta) baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi sebagian ulama lain berpendapat apabila anggota *musyārahah* lebih dari dua orang, maka pihak yang terbatalkan hanyalah pihak yang meninggal saja. Menurut Wahbah Zuhaili apabila murtadnya salah satu pihak dan berpindah ke Dar Harbi, konsekuensinya adalah sama dengan kematian.¹⁰³
- d. Salah satu pihak diletakkan dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *musyārahah* sedang berjalan maupun sebab yang lain.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat hilangnya penguasaan atas harta yang menjadi saham *musyārahah*.
- f. Modal para anggota *musyārahah* habis atau rusak sebelum dibelanjakan atas nama *musyārahah*.
- g. Berakhirnya tempo *musyārahah* atau telah selesainya pekerjaan *musyārahah*.
- h. Tidak adanya persamaan modal *musyārahah mufāwāḍah* ketika akad dimulai.

¹⁰³Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*...., hlm. 829.

2.5. *Musyārahah* dalam Konteks Kontemporer

Sesuai perkembangan semasa, para ulama kontemporer telah berusaha melakukan inovasi dan pengembangan akad *musyārahah* daripada konsep *musyārahah* klasik yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu. Hal ini untuk mengakomodir perkembangan kerjasama komersial dan sistem bisnis yang dilakukan oleh manusia pada zaman modern baik kerjasama antar individu, perusahaan maupun pemerintah supaya berjalan sesuai dengan syariat.

‘Isa ‘Abduh membagikan *syirkah* secara umum kepada beberapa macam yaitu *syirkah madaniyah* (publik), *syirkah tijariyah* (komersial), *syirkah asykhās* (kerjasama antar pelaku), *syirkah amwāl* (kerjasama modal), *syirkah ‘am* (umum) dan *syirkah khas* (khusus).¹⁰⁴ Muhammad al-Shawi membagikan *musyārahah* kontemporer kepada tiga macam yaitu *musyārahah dāimah*, *musyārahah ‘ala syafaqah muayyanah* dan *musyārahah mutanāqisah*. Muhammad al-Tuwaijiri¹⁰⁵ dan Taqiyuddin Al-Nabhāni menyebutkan *syirkah* kontemporer adalah persekutuan modal yang dibagikan kepada dua bentuk yaitu *syirkah asykhās* dan *syirkah amwa*.¹⁰⁶ Wahbah al-Zuhaili menghubungkan *syirkah* kontemporer dengan *syirkah* yang telah ada sebelumnya dan sejalan dengan pembagian yang telah ada didalam undang-undang sivil Suriah dan Mesir yaitu

.¹⁰⁷

¹⁰⁴ ‘Isa ‘Abduh, *Uqūd al-Syari’yyah al-Hākimah li Muamalāt Maliah Mua’asirah*, hlm. 34.

¹⁰⁵ Muhammad Al-Tuwaijiri, *Mausūah al-Fiqh Islāmi* (Amman: Bait Ifkar, 2009), hlm. 568.

¹⁰⁶ Taqiyudin Al-Nabhāni, *Nizāmal-Iqtisād al-Islamī* (Beirut: Dar Ummah, 2004), hlm. 161.

¹⁰⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, ..., hlm. 877

1. *Syirkah syakhṣi* atau *asykhāṣ* adalah perkongsian yang menekankan pada unsur kepribadian/kepercayaan antara para pihak yang berkongsi. Perkongsian *asykhaṣ* ini tidak hanya melihat pada modal yang disetor oleh setiap orang yang berkongsi. Tetapi hal utama dalam kerjasama ini adalah pelaku (*syārik/musyarik*) yang dapat sama-sama berperan dalam menentukan arah korporasi (perusahaan). *Syirkah asykhāṣ* mencakup : *syirkah taḍāmun*, *syirkah tauṣīyah basīṭah*, dan *syirkah muhāṣah*.¹⁰⁸ Penjelasannya seperti berikut :-

a. *Syirkah Taḍāmun*

Syirkah taḍāmun adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan bisnis dalam seluruh jenis perdagangan guna memperoleh keuntungan. Para sekutu (*syarik*) di dalamnya bertanggung jawab secara bersama atas seluruh kewajiban-kewajiban perusahaan, bukan hanya terbatas pada modal saja, tetapi hingga kepada harta pribadi yang dimiliki oleh setiap sekutu. Para pelaku bertanggung jawab dan saling menjamin (*taḍāmun*) terhadap semua kewajiban badan usaha yang tidak hanya terbatas pada jumlah modal yang disertakan, tetapi bertanggung jawab terhadap keseluruhan harta badan usaha yang didasarkan pada akad *syirkah*.¹⁰⁹

Wahbah al-Zuhaili mengidentifikasi bahwa *syirkah* ini mirip dengan *syirkah mufāwāḍah* yang dilarang oleh sejumlah ulama. Akan tetapi jika dilihat secara saksama, *syirkah mufāwāḍah* murni merupakan *syirkah* yang sulit dilaksanakan serta jarang sekali terjadi sehingga kebanyakan *syirkah* yang dilakukan merupakan *syirkah*

¹⁰⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh...*, hlm. 877.

¹⁰⁹ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 55.

'*inān*. Hal ini karena dalam *syirkah 'inān* tidak ada keharusan mengenai kesamaan jumlah modal, jenis usaha, dan agama.¹¹⁰ Keuntungan dari *syirkah* ini dibagi diantara para pelaku sesuai kesepakatan atau secara proporsional dan kerugian ditanggung berdasarkan jumlah modal karena terdapat riwayat hadis yang artinya:“ keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai jumlah modal”.¹¹¹

b. *Syirkah Tauṣiyah Basīṭah*

Syirkah jenis ini adalah perusahaan yang didirikan para sekutu yang sebagiannya saling bertanggung jawab dan sebagiannya hanya memberikan modal saja yaitu *mutaḍāmin* dan *muṣī*. *Mutaḍāmin* adalah pihak yang menyertakan modal usaha dan bertanggung jawab atas pengelolaan badan usaha. Mereka merencanakan, mengorganisir, menjalankan, dan mengawasi badan usaha, serta dapat bertindak atas nama dan untuk badan usaha. Juga turut saling bertanggung jawab dalam tugas dan menunaikan kewajiban- kewajiban badan usaha seperti utang perusahaan.¹¹²

Muṣī atau *syarik* adalah pihak yang telah menyerahkan atau menyertakan harta untuk dijadikan modal usaha tetapi tidak bertanggung jawab atas manajemen dan pengoperasian badan usaha serta tidak dibebani dengan kewajiban- kewajibannya.¹¹³ *Syirkah* seperti ini dibolehkan, karena para *fuqaha'* membolehkan dalam *syirkah 'inan* untuk mensyaratkan pekerjaan keatas salah satu *syarik*

¹¹⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh...*,hlm. 878.

¹¹¹Abdullah Yusuf Al-Zaylai', *Nasb al-Rayah li Ahādits Hidayah*, Juz 4....,hlm. 392-395.

¹¹² Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah...*,hlm. 55.

¹¹³Muhammad Al-Tuwajiri, *Mausūah al-Fiqh al-Islāmi...*,hlm. 568.

dan mempertanggungjawabkannya tanpa *syarik* lainnya. Ianya juga dapat dikategorikan sebagai salah satu pengembangan *syirkah mudhārabah*. Dimaksud dengannya karena *muṣī* atau *syarik* berkedudukan sebagai *rab al-māl* dengan segala ketentuannya sedang *mutaḍāmin* bertindak selaku *muḍarib* (pengelola) modal. Apabila berlaku kerugian maka ditanggung oleh pemilik harta sedang pengelola menanggung kerugian tenaga. Jika mendapat keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan.¹¹⁴

c. *Syirkah Muhāṣah*

Syirkah muhāṣah adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menanamkan sahamnya dalam suatu proyek dengan menyumbang bagian dari modal atau pekerjaan dengan ketentuan pembagian keuntungan atau kerugian berdasarkan porsi penyertaan modal/kerja (sesuai dengan kesepakatan).¹¹⁵ Kerjasama ini tidak permanen dan tidak mempunyai wujud organisasi yang jelas karena hanya bersifat temporal (*waqtiyyah*) seperti lelang atau jual beli yang menggunakan jasa pihak ketiga (*samsarah*) dengan tujuan memperoleh laba bersih secara cepat dan seketika setelah penjualan atau lelang berlangsung. Realitasnya adalah salah satu *syārik* mewakili *syārik* lainnya, dan pada saat itulah *syirkah* berlangsung tanpa ada badan usaha *syirkah*. *Syirkah muhāṣah* pada umumnya dibolehkan oleh para ulama karena dianggap pengembangan dari akad *syirkah inān*.¹¹⁶

¹¹⁴ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah...*, hlm. 58.

¹¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh...*, hlm. 880.

¹¹⁶ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah...*, hlm. 59.

2. *Syirkah amwāl* kontemporer menurut Rafiq Yunus al-Mishri adalah perkongsian dalam modal, tanpa melihat pada kepribadian orang-orang yang berkongsi.¹¹⁷ *Syirkah amwāl* ini mencakup : *syirkah musāhamah* (perkongsian berbentuk saham), *syirkah tauṣiyah bil al ašham* dan *syirkah dzat mas'uliyah al mahdūdah*. Penjelarasannya adalah seperti berikut :-

a. *Syirkah musāhamah*

Bentuk ini adalah jenis perusahaan modal yang paling dikenal, yaitu perusahaan yang modalnya dibagi kedalam bagian-bagian kecil yang dinamakan saham yang bisa diperjual belikan dan setiap pemilik bertanggung jawab sebatas jumlah nilai nominal saham-sahamnya. Menurut Wahbah Zuhaili, hukum perusahaan bentuk ini ini boleh menurut syariat, karena perusahaan ini termasuk *syirkah 'inān* yang didirikan atas dasar keridhaan.¹¹⁸

Menurut Rafiq Yunus, para ulama berbeda kepada dua pendapat Sebagiannya menganggap ianya tidak dibolehkan karena setiap individu dapat masuk dan menjadi rakan kongsi dalam perusahaan ini dengan membeli bagian saham tertentu meskipun tidak diridhai oleh sekutu perusahaan yang lain. Juga karena hak suara dalam mengelola perusahaan ditentukan oleh jumlah saham yang dipegang. Pendapat kedua membenarkan atas dasar selagi mana ia tidak terlibat dengan usaha yang haram maka dibolehkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan asal dalam setiap transaksi muamalah adalah dibolehkan.¹¹⁹

¹¹⁷Rafiq Yunus al-Mishri, *Fiqh Muamalah Maliah...*, hlm. 269.

¹¹⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh...*, hlm. 881.

¹¹⁹Rafiq Yunus al-Mishri, *Fiqh Muamalah Maliah...*, hlm. 269-270.

b. *Syirkah taūṣiah bil al ashām*

Dalam perusahaan ini terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu kerja dan sekutu pemegang saham. Sekutu pemegang saham adalah sama seperti mitra tidak akif dalam *syirkah taūṣiah baṣīṭah* dengan pertanggungjawaban sebatas bagian modal yang disetorkan saja. Menurut Wahbah Zuhaili, *syirkah* ini mirip dengan *syirkah taūṣiah baṣīṭah* dengan adanya dua jenis sekutu dalam perusahaan. Salah satunya sebagai *mutaḍāmin* sedang yang keduanya sebagai *musāhim*.

Mutaḍāmin menyumbangkan modal dan mengelola perusahaan secara aktif sedangkan *musāhim* menyetorkan modal tetapi tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan model ini diharuskan oleh syara' karena perusahaan ini termasuk ke dalam pengembangan jenis *syirkah 'Inan* yang di dalamnya disyaratkan adanya saling bertanggung jawab antar sebagian sekutu (*damānah*), dan tanggungan (*kafālah*) tersebut dibolehkan.¹²⁰

c. *Syirkah dzat mas'uliyah al mahdūdah*

Syirkah yang memiliki tanggung jawab terbatas. *Syirkah* ini adalah perusahaan dagang seperti perusahaan modal lainnya. Tidak ada penyebutan pribadi para mitra di dalamnya. *Syirkah* ini menyatukan antara keistimewaan *syirkah amwāl* (modal) dan *syirkah asykhāsh* (personil). Semua ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam *syirkah* ini boleh menurut syara' karena dianggap sebagai bagian dari *syirkah 'Inan*.¹²¹

¹²⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh...*, hlm. 882.

¹²¹ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah...*, hlm. 75.

3. *Syirkah Mutanāqisah* (perkongasian yang berlaku pengurangan penyertaan modal).

Dalam Fatwa DSN No 73/2008 tentang *Musyārahah Mutanāqisah* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *musyārahah mutanaqisah* adalah kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarīk*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Secara fikih, akad *musyārahah mutanāqisah* pada dasarnya menggunakan beberapa akad gabungan (*hybrid contracts*). Dengan konsep tersebut, maka akad-akad yang dipergunakan dalam LKS Islam dapat digabung menjadi suatu produk transaksi bisnis kontemporer dengan dua ketentuanyaitu: pertama, syari'ah tidak melarang penggabungan tersebut dan kedua, penggabungan akad-akad itu bukan menjadi wasilah (*hīlah*) kepada hal yang haram (*riba'*).

Minima terdapat empat akad gabungan dalam produk *musyārahah mutanāqisah* yaitu *syirkah 'inān (musāhamah)*, *ijārah*, perwakilan (*wakālah*) dalam pengelolaan penyewaan, dan pembelian secara bertahap. Mengenai konsep *musyārahah mutanāqisah* ini, dapat dilihat relasinya menurut pendapat ulama. Antaranya pendapat Ibnu Qudamah yang menyebutkan bahwa apabila salah satu dari dua yang bermitra (*syarīk*) membeli porsi (*hiṣṣah*) yang sebelumnya dimiliki oleh mitra lainnya, maka hukumnya boleh karena ia seumpama membeli milik pihak lain.¹²²

¹²² Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 173.

Sebagai tambahan, hal yang membedakan *musyārahah* dan *muḍārabah* adalah :¹²³

- 1) Dalam *musyārahah* disyaratkan bahwa modal berasal dari para *syārik*. Baik ianya merupakan *syirkah 'inān* (yang ada persamaan modal) atau *syirkah mufāwāḍah* (modal yang disertakan tidak sama). Sementara dalam *muḍārabah*, modal disediakan oleh salah satu pihak (yaitu *ṣāhib al māl*)
- 2) Keuntungan *musyārahah* dibagikan dengan dua cara yaitu secara proporsional berdasarkan jumlah modal yang disertakan atau berdasarkan kesepakatan yang ada dalam kontrak perjanjian. Pada *muḍārabah*, keuntungan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan pada kontrak perjanjian baik secara proporsional maupun sejumlah yang disepakati bersama.
- 3). Jika berlaku kerugian, dalam *musyārahah* ditentukan berdasarkan proporsi modal manakala kerugian harta dalam *muḍarabah* ditanggung oleh pemilik modal. Menurut Wahbah Zuhaili, *syirkah* modern dalam kategori *syirkah asykhās* merupakan suatu bentuk pengembangan *syirkah muḍārabah*. Sedangkan bentuk *syirkah amwāl* kontemporer sering terjadi dalam bentuk syirkat *'inān*, atau dapat juga berlaku dalam bentuk *syirkah mufāwāḍah* atau *syirkah muḍārabah*.¹²⁴

¹²³Nadrattuzaman Hosen dan AM. Hassan Ali, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah* (Jakarta : PKES Publishing, 2007), hlm. 53-56.

¹²⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh ...*, hlm. 883.

BAB III

FATWA DSN-MUI DAN MPS BNM TENTANG *MUSYARAKAH*

3.1. Profil DSN-MUI dan MPS BNM

3.1.1 Sejarah DSN MUI dan MPS BNM

Keberadaan lembaga Dewan Syariah adalah sesuatu yang esensial bagi menjamin kegiatan dan operasional di institusi keuangan syariah di seluruh dunia berjalan sesuai dengan standar dan nilai-nilai Islam. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berawal dari keperluan semasa seiring perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengadakan rapat tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997.

Ia rentetan dari Lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah yang diselenggarakan MUI tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta yang merekomendasikan perlunya sebuah lembaga khusus membenahi masalah- masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS).¹²⁵ Pada tahun 1999, lembaga ini diperkukuhkan pendiriannya melalui SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 bertanggal 10 Februari 1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional. Salah satu tugas utama Dewan Syariah Nasional adalah mengeluarkan fatwa tentang produk dan jasa keuangan syariah. Dengan adanya DSN diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.

¹²⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 32.

Di Malaysia, Majlis Penasihat Syariah (MPS) Bank Negara Malaysia didirikan pada tahun 1997 sebagai badan otoritas tertinggi dalam membuat fatwa dan penetapan syariah berhubung dengan sektor keuangan Islam di Malaysia. Majlis ini merupakan satu badan penasihat yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan regulasi perusahaan dan lembaga keuangan berbasis Islam di Malaysia. Majlis ini mempunyai kedudukan lebih tinggi berbanding dengan komite syariah bank-bank komersial lainnya.¹²⁶ Jika wujud sebarang perbedaan pendapat antara MPS BNM dengan Komite Syariah bank-bank lain, maka segala keputusan lembaga ini dijadikan sebagai pedoman final yang bersifat mengikat.

Badan ini merupakan salah satu badan yang berotoritas dalam membuat regulasi dan fatwa ekonomi syariah di Malaysia selain Majlis Fatwa Kebangsaan, Majlis Fatwa negeri-negeri dan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti. Sesuai ketentuan perundang-undangan, badan ini diiktiraf sebagai otoritas utama dalam kasus-kasus berkaitan keuangan Islam di Malaysia.¹²⁷ Berbeda dengan keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan dan Majlis Fatwa negeri-negeri yang menggunakan istilah fatwa bagi keputusan yang dikeluarkan, MPS BNM dan MPS Suruhanjaya Sekuriti menggunakan istilah resolusi. MPS dianggotai oleh pakar-pakar ekonomi yang ahli di bidang syari'ah serta berpengetahuan dan berpengalaman luas mengenai sistem perbankan, transaksi keuangan, ekonomi, undang-undang dan implementasi prinsip-prinsip syari'ah.

¹²⁶Zulkifli Hasan, *Regulatory Framework of Shari'ah Governance System in Malaysia, GCC Countries and the UK*, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 3-2 (March 2010), hlm. 85

¹²⁷Malaysia, *Akta Bank Negara Malaysia 2009*, Bagian 7 Bab 1 Seksyen 51-58.

3.1.2 Posisi DSN-MUI dan MPS BNM di Negara Masing-masing.

Menurut Akram terdapat negara yang membenarkan lembaga keuangan Islamnya mengeluarkan fatwanya sendiri secara independen. Sebagian negara lagi melakukan sentralisasi fatwa melalui sebuah badan atau lembaga khusus yang akan mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengikat seluruh institusi keuangan Islam yang bernaung di bawahnya. Antara negara yang memberlakukan ketentuan dalam bentuknya yang pertama seperti negara-negara di Timur Tengah. Sedangkan Malaysia dan Indonesia tergolong dalam tipe kedua yang memberlakukan sentralisasi fatwa ekonomi syari'ah.¹²⁸

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syari'ah atau tidak langsung. Juga berperan memberi bantuan dalam bentuk kepakaran kepada para pihak terkait, seperti Depkeu, BI dan lain-lain ketika proses penyusunan peraturan untuk lembaga keuangan syari'ah. Keanggotaan DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para ahli dalam bidang yang berkaitan dengan muamalah syari'ah.¹²⁹ Pembiayaan operasionalnya diperoleh dari bantuan pemerintah, bank Indonesia, masyarakat serta iuran dari lembaga keuangan syari'ah.

Dalam mekanisme kerjanya berhubungan erat dengan badan pengawas harian dan Dewan Pengawas Syariah di institusi keuangan Islam yang mempunyai tugas dan wewenang yang tersendiri. Relasi

¹²⁸Akram Laldin dkk, *Fatwas in Islamic Banking: A Comparative Study between Malaysia and Gulf Cooperation Council (Gcc) Countrie*, ISRA Research Paper No 31/2012, hlm. 2.

¹²⁹Imam Abdul Hadi, "Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (Dsn-Mui) pada Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2011, hlm. 6. Lihat lampiran 3 dan 4.

DSN-MUI dan DPS karena mengingat bahwa sejarah pembentukan DSN ini sendiri merupakan konsekuensi dari berkembangnya jumlah Lembaga Keuangan Syariah dan bertambahnya jumlah DPS yang berada pada masing-masing lembaga tersebut. Hal demikian pada awalnya telah menyebabkan muncul fatwa yang berbeda antara DPS satu lembaga dengan yang lainnya sehingga dikhawatirkan akan membingungkan umat. Oleh karenanya MUI menganggap perlu dibentuknya satu Dewan Syariah yang bersifat nasional, sekaligus membawahi seluruh Lembaga Keuangan Syariah di bawah satu payung organisasi nasional yang akhirnya dikenal dengan nama Dewan Syariah Nasional (DSN).¹³⁰

Di Malaysia, Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia merupakan badan rujukan tertinggi dalam sistem perbankan Islam berdasarkan ayat bagian ketujuh seksyen 51-58 Undang-Undang Bank Negara Malaysia tahun 2009. Ia berotoritas dalam menetapkan peraturan dan aturan syariah dalam bidang keuangan Islam di Malaysia yang mengikat seluruh lembaga keuangan syaria'ah dibawahnya.¹³¹ Meskipun secara struktural badan ini berada dibawah BNM, akan tetapi bersifat independen dalam hal merumus, membuat keputusan dan ketentuan hukumnya. Keputusan yang dibuat oleh Majlis Penasihat ini dikenal dalam bentuk resolusi syaria'ah yang mulai dikeluarkan pertama kalinya pada tanggal 8 Julai 1997.

Resolusi syaria'ah ini diperlukan sebagai panduan bagi para pihak yang berkepentingan. Terutama bagi institusi keuangan yang menawarkan pelayanan dan jasa perbankan serta keuangan Islam,

¹³⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...*, hlm. 32.

¹³¹Lihat juga (*Islamic Financial Service Act 2013*). BNM, *Rangka Kerja Kawalan Kehematan dan Penyeliaan-Rangka Kerja Tadbir Urus Syariah Baharu* (Malaysia: BNM, 2009), hlm. 109.

komite syari'ah serta masyarakat awam. Keberadaannya juga penting sebagai salah satu pedoman hukum bagi mahkamah dan juga lembaga arbitrase ketika membuat putusan hukum terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan sektor keuangan Islam di Malaysia.¹³²

3.1.3 Peran, Fungsi serta Wewenang DSN-MUI dan MPS BNM

Menurut Asjmuni, secara khusus tugas dan fungsi penetapan fatwa terkait ekonomi syari'ah di Indonesia merupakan tanggungjawab Dewan Syariah Nasional-MUI. Hal ini sesuai dengan Lampiran II dari SK MUI No. Kep-754/MUI/II/99 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional yang dijadikan pedoman dasar Dewan Syariah Nasional melalui Keputusan DSN-MUI No. 01 Tahun 2000. Peran dan fungsi DSN-MUI antara lain mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syari'ah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator, menerbitkan rekomendasi, sertifikasi, dan *syari'ah approval* bagi lembaga keuangan dan bisnis syari'ah, dan melakukan pengawasan aspek syari'ah atas produk/jasa di lembaga keuangan/ bisnis syari'ah melalui Dewan Pengawas Syariah.

Selanjutnya wewenang DSN-MUI adalah mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia, memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan dan bisnis

¹³²Mohamed Hadi Hamid, "Majlis Penasihat Syariah: Nasihat yang Mesti Dipatuhi", *Jurnal Muamalat* Bil. 4, 2011, hlm. 195.

syari'ah.¹³³ Wewenang lain adalah mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syari'ah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri, memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, dan mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.¹³⁴

Menurut aturan di Malaysia, MPS diberikan mandat untuk merangka dan menentukan standar Syariah bagi bisnis perbankan Islam, takaful, keuangan Islam, pembangunan keuangan Islam atau bisnis lain berdasarkan ketentuan prinsip syari'ah yang berada di bawah kawalan serta pengawasan Bank Negara Malaysia. MPS sebagai badan rujukan dan penasihat Bank Negara Malaysia berhubung dengan perkara Syariah juga bertanggungjawab untuk mengesahkan semua produk perbankan Islam dan takaful bagi memastikan produk-produk tersebut mematuhi prinsip Syariah. Selain itu, MPS juga berperan sebagai penasihat Bank Negara Malaysia berhubung dengan isu-isu berkaitan dengan manajemen bisnis atau manajemen keuangan Islam Bank Negara Malaysia dan badan-badan berkaitan yang lain.¹³⁵

Berdasarkan peruntukan Akta Bank Negara Malaysia 2009, peranan dan fungsi MPS telah diperkukuh statusnya sebagai badan berotoritas tertinggi dalam menentukan hal-hal Syariah berhubung

¹³³ Asjmuni Abdurrachman, "Prosedur Penetapan Keputusan Fatwa DSN-MUI", *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi 18, 2008, hlm. 174.

¹³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...*, hlm. 33.

¹³⁵ Mohd Izzat dan Ruzian Markom, "Peranan dan Kedudukan MPS untuk Memperkasakan Sistem Keuangan Islam di Malaysia", *Jurnal Pengurusan UKM* No 38, 2013, hlm. 127.

dengan perbankan Islam, takaful dan keuangan Islam. Keputusan MPS bukan sahaja berlaku bagi institusi keuangan Islam, malah juga terhadap mahkamah dan badan arbitrase yang perlu merujuk kepada keputusan MPS bagi setiap prosesi beracara yang berkaitan dengan bisnis dan keuangan Islam, serta harus memperakui bahawa keputusan MPS adalah mengikat.¹³⁶

3.1.4 Prosedur serta Mekanisme Pembuatan Fatwa DSN-MUI dan MPS BNM

Sesuai pedoman penetapan fatwa MUI, aspek penting dalam proses penetapan suatu fatwa adalah prosedur penemuan hukumnya. Setiap keputusan fatwa harus berupa pendapat hukum yang mempunyai dasar-dasar (*adillah al-ahkam*) paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Dasar-dasar dimaksud adalah Al-Qur'an, Hadits, *ijma'*, *qiyās*, dan dalil-dalil hukum lainnya.¹³⁷ Selanjutnya dirumuskan dengan memperhatikan kaidah-kaidah *uṣūliyyah*, kaidah-kaidah fikih (*Qawā'id al-Fiqhiyyah*) juga dengan mempertimbangkan ruh syariat yang mengandungi kemaslahatan. Melalui mekanisme tersebut para ulama berupaya menghasilkan produk hukum yang digali dari *naṣ* syara' yang utama yaitu Al-Quran dan Sunnah serta pendapat para generasi awal dan manhaj para imam pendiri mazhab terdahulu yang masih diguna pakai hingga saat ini.¹³⁸

DSN MUI ketika mengeluarkan suatu fatwa yang berkaitan ekonomi syari'ah umumnya tetap terikat dengan Pedoman Penetapan

¹³⁶Muhammad Hafiz Bin Badarulzaman, Akta Bank Negara 2009:Implikasi Sebelum dan Selepas Pindaan terhadap Majlis Penasihat Syariah,*Jurnal Muamalat*, Bil. 7, 2014, hlm. 168.

¹³⁷MUI, *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997*.

¹³⁸Agus Mahfudin, Majelis Ulama Indonesia Dan Metode Fatwa, *Religi: Jurnal Studi Islam*, Vol 6, No 1, April 2015, hlm. 157.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia sesuai posisinya yang berada dibawah MUI. Proses *istinbat* hukum menggunakan pendekatan berpandukan kepada *naş-naş* yang utama yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Jika tidak ditemukan maka disandarkan kepada hasil *ijtihad* para ulama terdahulu yang terangkum dalam kitab-kitab fikih yang mu'tabar. Jika ditemukan perselisihan diantara pendapat para ulama tersebut maka disesuaikan dan diharmonisasikan.¹³⁹

Menurut Asjmuni, apabila tidak mungkin dilakukan yang demikian, dipilih pendapat yang dianggap lebih kuat dari sudut dalil-dalilnya dan lebih kredibel diantara pendapat-pendapat yang ada. Untuk sebarang permasalahan baru (kontemporer) yang tidak ditemukan *naş* yang jelas tentang hal tersebut, juga tidak didapatkan pendapat-pendapat dari hasil *ijtihad* para ulama terdahulu maka anggota DSN-MUI akan melakukan *ijtihad* secara kolektif. Hal ini dijalani berdasarkan pendekatan (*manhaj*) para ulama terdahulu dan ulama terkemudian dengan meraikan keperluan dan kemaslahatan ummat.¹⁴⁰

Sesuai manual rujukan institusi keuangan kepada MPS, metode atau pendekatan yang diguna pakai oleh MPS-BNM dalam penetapan fatwa atau resolusinya adalah dengan merujuk kepada sumber utama dan sumber kedua. Sumber utama ialah dari Al-Quran dan al-Sunnah. Sumber kedua (sekunder) ialah *ijtihad* yang terdiri daripada *ijma'*, *qiyās*, *masalah*, *istihsān*, *istishāb*, *sadd dzari'ah*, *'urf*, *siyāsah al-syar'iyyah*, *ta'wil*, *istiqra'* dan *talfiq*.¹⁴¹ Dalam implementasinya, MPS-BNM turut mendukung pendekatan *maqāsid*

¹³⁹MUI, *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997*.

¹⁴⁰Asjmuni Abdurrachman, "Prosedur Penetapan Keputusan Fatwa DSN-MUI", *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi 18, 2008, hlm. 177.

¹⁴¹Suhaimi Mohd Yusof dan Ahmad Hazim Alias, Pendekatan Membuat Keputusan Syariah dalam Kewangan Islam, *Jurnal Muamalat*, Bil. 1, 2008, hlm. 52-53.

al-syari'ah dan memelihara kemurniannya. Pendekatan ini diaplikasikan dalam setiap keputusan yang dikeluarkan oleh MPS-BNM. Keputusan-keputusan ini perlu melalui proses perbincangan yang mendalam, proses konsultasi yang teliti dan dilakukan secara sistematis sesuai ketentuan dalam standar prosedur manajemen Syariah di Malaysia.¹⁴²

3.2 Fatwa DSN-MUI dan MPS BNM tentang *Musyārahah*

3.2.1 Latar Belakang Fatwa DSN MUI dan MPS BNM tentang *Musyārahah*

Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi lahirnya fatwa DSN-MUI tentang *musyārahah* seperti yang tertuang dalam bagian awal fatwa yang telah dikeluarkan. Pertama, atas dasar kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyārahah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kedua, karena faktor pembiayaan *musyārahah* yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan dan ditawarkan oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS). Ketiga, bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah

¹⁴²BNM, *Manual Rujukan Institusi Keuangan Islam kepada Majlis Penasihat Shariah* (Malaysia: BNM, 2010), hlm. 4-6.

Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *musyārahah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.¹⁴³

Latar belakang terbitnya fatwa atau disebut dengan istilah resolusi MPS BNM tentang *musyārahah* adalah sebagai suatu jawaban atas pertanyaan yang telah dikemukakan oleh sebuah institusi keuangan Islam yang bercadang untuk menawarkan dua bentuk produk pembiayaan berasaskan konsep *musyārahah*.¹⁴⁴ Bagi syarat umum kedua-dua pembiayaan *musyārahah* yang dicadangkan terdapat tujuh syarat yaitu : pertama, semua pihak dalam *musyārahah* perlu menyumbang modal, kedua, institusi keuangan Islam sebagai rakan kongsi/pembiaya boleh meletakkan syarat-syarat tertentu (*taqyīd*), ketiga, pembagian keuntungan adalah berasaskan jumlah yang dipersetujui manakala kerugian ditanggung berdasarkan jumlah sumbangan modal, dan keempat tiada jaminan pada modal dan hanya boleh dibuat dalam kes kecuaiian dan pelanggaran syarat-syarat perjanjian *musyārahah*.

Kelima, nisbah pembahagian keuntungan boleh diubah dengan kesepakatan semua rakan kongsi. Keenam, syarat pembelian semula bahagian mana-mana rakan kongsi adalah berdasarkan harga pasaran (*qimah suqiyyah*) atau harga yang disepakati bersama dan bukannya harga nominal (*qimah ismiyyah*), dan ketujuh mana-mana rakan kongsi dalam *musyārahah* boleh meletakkan syarat bahawa sekiranya keuntungan melebihi had tertentu (*siling*), salah seorang

¹⁴³DSN MUI, *Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Musyārahah*., hlm. 1.

¹⁴⁴MPS BNM, *Resolusi Syariah Dalam Keuangan Islam Edisi Kedua*, (Malaysia: BNM, 2010), hlm. 40.

rakan kongsi boleh melepaskan hak (*tanāzūl*) keuntungan yang melebihi had tersebut.¹⁴⁵

Dua bentuk pembiayaan secara *musyārahah* yang dicadangkan oleh institusi keuangan yang meminta putusan *musyārahah* tersebut adalah dalam bentuk projek usaha sama atau perkongsian berasaskan akun bersama tanpa penubuhan sebuah badan yang berasingan. Perjanjian pembiayaan *musyārahah* akan dimeterai antara institusi keuangan Islam dengan nasabah. Pembiayaan akan disalurkan ke dalam akun bersama secara sekaligus atau secara bertahap. Akun bersama tersebut akan didaftarkan atas nama nasabah manakala perjalanan manajemen bisnis akun akan diselenggarakan secara bersama oleh institusi keuangan Islam dan nasabah.

Institusi keuangan yang bertanya juga mencadangkan bentuk kedua, yaitu bentuk penyertaan aset yang melibatkan pendirian sebuah syarikat usaha sama persekutuan terbatas atau sendirian berhad sesuai Akta Syarikat 1965. Sebuah entitas korporat akan ditubuhkan oleh institusi keuangan Islam dan nasabah bagi menjalankan projek tertentu. Pihak yang akan mengelola perusahaan tersebut akan dilantik oleh para pihak sebagai mewakili kepentingan mereka dan bertanggungjawab terhadap kemajuan projek. Institusi keuangan Islam akan membuat pembayaran pembiayaan *musyārahah* secara sekaligus melalui penambahan modal berbayar kepada perusahaan tersebut. Maka dalam hal ini diperlukan pandangan dari MPS BNM tentang legalitas akad pembiayaan *musyārahah* seperti yang telah diajukan.¹⁴⁶

¹⁴⁵MPS BNM, *Resolusi Syariah dalam Keuangan Islam Edisi Kedua...*, hlm. 41.

¹⁴⁶MPS BNM, *Resolusi Syariah dalam Keuangan Islam Edisi Kedua...*, hlm 41-42. Lihat juga: BNM, *Standar Musyārahah*(Malaysia: BNM, 2015), hlm. 1-13.

3.2.2 Fatwa DSN MUI tentang *Musyārahah*

Fatwa *musyārahah* yang telah diputuskan oleh DSN MUI seperti yang tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan *Musyārahah* disusun dengan memperhatikan beberapa elemen utama. Empat elemen tersebut adalah dasar pertimbangan fatwa, dasar hukum yang terdiri daripada dalil-dalil tentang kebolehan *musyārahah*, proses pengambilan hukum (rapat pleno) serta tanggal penetapan fatwa dan terakhir adalah keputusan fatwa DSN MUI tentang *musyārahah*. Dasar pertimbangan fatwa terdiri daripada tiga hal yaitu kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan sesuai syariah khususnya *musyārahah*, keperluan LKS dan urgensi regulasi DSN MUI terhadap praktik *musyārahah* yang dijalankan.¹⁴⁷

Pada elemen yang kedua mengenai dasar hukum fatwa *musyārahah* yang dikeluarkan dimuatkan dengan sandaran dalil-dalil keputusan fatwa. Dalil-dalilnya terdiri daripada dua ayat Al-Quran yang membenarkan transaksi *musyārahah*, dua hadis Nabi SAW dan *taqirir* baginda tentang *musyārahah*, *ijma'* para ulama tentang legalitas akad ini, dan satu kaidah fikih muamalah. Pada elemen ketiga dinyatakan proses akhir dalam menetapkan keputusan fatwa tentang *musyārahah* melalui rapat pleno para ahli dan diputuskan pada tanggal 8 Muharram 1421 Hijriah bersamaan 13 April 2000 Masihi di Jakarta.

Sedang elemen keempat menyangkut keputusan fatwa DSN MUI tentang *musyārahah* yang memuat empat ketentuan khusus tentang akad *musyārahah*. Tiga daripada ketentuan tersebut menyangkut rukun-rukun dalam berakad *musyārahah* yaitu tentang

¹⁴⁷DSN MUI, *Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Musyārahah...*, hlm. 1.

sighah akad (*ijab qabul*), para pihak yang berakad (*al-‘aqidain*), dan objek akad (*ma‘aqud ‘alaih*). Ketentuan keempat menyebutkan tentang butiran teknis menyangkut biaya operasional dan solusi apabila terjadinya persengketaan. Ketentuan tentang *sighah* akad *musyārahah* diuraikan kepada tiga hal yaitu keharusan *ijab qabul* secara eksplisit menggambarkan kehendak dan tujuan akad, penerimaan dari penawaran dilakukan bersamaan pada saat kontrak dan akad dituliskan secara tertulis, korespondasi atau melalui alat-alat komunikasi modern.¹⁴⁸

Ketentuan terhadap para pihak yang berakad *musyārahah* dijelaskan ke dalam lima hal yaitu kompetensi mereka dalam memberikan dan menerima perwakilan (*wakālah*), keduanya keharusan para pihak memberikan kontribusi modal baik berbentuk dana maupun usaha (*isytirak*), ketiga adalah hak setiap mitra untuk mengatur aset *musyārahah* dalam proses bisnis normal (*taṣarruf*). Keempat, pengelolaan atas dasar saling menjaga kepentingan bersama serta menghindari kelalaian dan kesalahan secara sengaja. Terakhir adalah larangan terhadap setiap mitra untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

Ketentuan ketiga menyangkut objek akad *musyārahah* terdiri daripada empat hal yaitu tentang modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Modal terdiri daripada uang tunai, emas, perak dan sebagainya. Sedangkan jika modal berbentuk aset dapat disertakan setelah dinilai secara tunai dan disepakati para mitra. Demikian juga pengelolaannya harus melalui kesepakatan para mitra. Bagi tujuan

¹⁴⁸DSN MUI, *Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Musyārahah...*, hlm. 2. Lihat juga: Tim Penyusun, *Buku Standar Produk Musyārahah dan Musyārahah Mutanāqishah* (Jakarta:OJK, 2016), hlm. 21-22.

menghindari terjadinya penyimpangan, DSN MUI membenarkan LKS untuk meminta jaminan. Dalam hal kerja, partisipasi para mitra adalah satu keharusan meskipun tidak harus sama porsi kerjanya. Mitra yang melakukan lebih banyak usaha dapat menuntut bagian tambahan keuntungan bagi dirinya. Sedang kedudukan masing-masing mitra dalam organisasi harus dijelaskan dalam kontrak.¹⁴⁹

Menyangkut tentang keuntungan terdapat empat ketentuan yaitu keharusan kuantifikasi secara jelas bagi menghindari perbedaan dan sengketa sewaktu alokasi keuntungan maupun penghentian *musyarakah*. Keuntungan ditentukan secara proporsional berdasarkan seluruh keuntungan dan para mitra dapat mengusulkan kelebihan diberikan kepadanya apabila keuntungan melebihi jumlah tertentu. Terakhir adalah sistem pembagian keuntungan harus jelas tertuang dalam akad. Dalam hal kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.¹⁵⁰

Ketentuan keempat dalam elemen keempat fatwa ini adalah tentang butiran biaya operasional dan solusi jika terjadinya persengketaan para pihak. Biaya operasional dibebankan daripada modal bersama. Sedangkan jika terjadinya sebarang persengketaan didahulukan pendekatan musyawarah dan kesepakatan bersama antara para pihak. Fatwa ini ditutup dengan menyertakan tempat dan tanggal penetapan fatwa seperti yang tercantum pada elemen ketiga fatwa serta ditandatangani oleh Prof KH. Ali Yafie selaku ketua dan Drs

¹⁴⁹DSN MUI, *Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah...*, hlm. 2.

¹⁵⁰Lihat juga: Tim Penyusun, *Buku Standar Produk Musyarakah...*, hlm. 34.

H.A Nazri Adlani sebagai sekretaris DSN MUI pada saat fatwa *musyarakah* ini disahkan.¹⁵¹

3.2.3 Fatwa MPS BNM tentang *Musyarakah*

Resolusi MPS BNM tentang *musyarakah* yang telah diterbitkan oleh BNM dalam Himpunan Resolusi Syariah Dalam Keuangan Islam Edisi Kedua Tahun 2010 disusun secara sistematis kepada empat elemen utama. Ini terdiri daripada pengertian akad *musyarakah* dan nomor resolusi berdasarkan urutan keputusan-keputusan yang telah diterbitkan oleh MPS BNM dalam Resolusi Syariah Dalam Keuangan Islam Edisi Kedua (Resolusi nomor 29). Selanjutnya bentuk pertanyaan yang telah diajukan oleh LKS kepada MPS BNM juga konsep produk yang ingin ditawarkan. Ketiga, keputusan yang ditetapkan tentang *musyarakah* oleh MPS BNM beserta tanggal penetapannya. Terakhir dijelaskan dasar hukum keputusan dengan menyebutkan dalil-dalil syara' yang digunakan oleh MPS BNM.

MPS BNM mengartikan *musyarakah* sebagai kontrak perkongsian antara dua pihak atau lebih untuk membiayai sesuatu usaha niaga perniagaan dan semua pihak yang terlibat menyumbangkan modal sama ada dalam bentuk tunai atau lain-lain. Keuntungan daripada perkongsian akan dikongsi bersama berdasarkan nisbah yang dipersetujui, manakala kerugian akan ditanggung bersama berdasarkan nisbah sumbangan modal masing-masing.¹⁵² Konsep *musyarakah* pada hari ini digunakan dalam aktiviti-aktiviti pelaburan

¹⁵¹DSN MUI, *Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah...*, hlm. 4. Lihat juga: *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bab VI, Pasal 134-186.

¹⁵²Lihat juga: BNM, *Standar Musyarakah* (Malaysia: BNM, 2015), hlm. 1.

dan juga pembiayaan. Pembiayaan berasaskan *musyarakah* merangkumi pembiayaan modal kerja (*working capital financing*), pembiayaan perdagangan (*trade financing*) dan pembiayaan aset (*asset financing*).¹⁵³

Pertanyaan yang diajukan oleh LKS yang merujuk MPS BNM tentang *musyarakah* terdiri daripada dua hal yaitu konsep dan syarat-syarat *musyarakah* yang ingin ditawarkan serta bentuk yang dicadangkan. Konsep *musyarakah* yang diajukan memuat tujuh syarat yaitu keharusan sumbangan modal setiap mitra, LKS sebagai mitra dapat meletakkan persyaratan tertentu (*taqyid*), pembagian keuntungan berdasarkan persentase yang dipersetujui manakala kerugian berdasarkan nisbah sumbangan modal. Selanjutnya tiada jaminan pada modal melainkan dibuat untuk menghindari kecuaiian dan pelanggaran syarat-syarat perjanjian *musyarakah*.

Syarat keenam, nisbah pembagian keuntungan boleh diubah melalui kesepakatan, pembelian semula mana-mana porsi saham dari para mitra yang lainnya berdasarkan harga pasar atau harga yang dipersetujui dan terakhir masing-masing pihak dapat meletakkan persyaratan untuk melepaskan hak (*tanāzul*) keuntungannya apabila keuntungan melebihi suatu batas tertentu. Adapun dua bentuk *musyarakah* yang dicadangkan adalah pembiayaan usaha suatu projek kerjasama daripada satu akun yang yang dikelola secara bersama oleh para mitra tanpa perlu mewujudkan satu entitas perusahaan baru. Bentuk kedua adalah pendirian satu entitas korporat yang baru sesuai Akta Syarikat Malaysia 1965 oleh para pihak untuk melaksanakan projek yang dikehendaki.

¹⁵³MPS BNM, *Resolusi Syariah Dalam Keuangan Islam Edisi Kedua...*, hlm. 40.

Pada elemen ketiga dinyatakan proses penetapan keputusan melalui mesyuarat ke-53 bertanggal 29 September 2005 membolehkan bentuk pembiayaan *musyārahah* seperti yang telah diajukan oleh LKS yang bersangkutan. Hal ini dengan ketentuan tiadanya elemen jaminan modal dan/atau keuntungan oleh rakan kongsi ke atas rakan kongsi yang lain. Selanjutnya dinyatakan asas pertimbangan (dalil-dalil) yang mendasari penetapan keputusan ini yang terdiri daripada satu ayat Al-Quran, satu buah hadis dan *taqrir* Nabi SAW, dua *atsar* sahabat baginda SAW dan *ijma'* para ulama tentang kebolehan *musyārahah*.¹⁵⁴

3.3 Dalil dan Metode *Istinbat al-Hukmi* Fatwa DSN-MUI dan MPS BNM tentang *Musyārahah*

3.3.1 Dalil-dalil yang digunakan

Dalam fatwa DSN MUI terdapat dua ayat Al-Quran yang telah dijadikan sebagai sandaran kebolehan akad *musyārahah*, tiga buah hadis, *ijma'* dan satu kaidah fikih. Sedang dalam resolusi MPS BNM terdapat satu ayat Al-Quran, satu hadis Rasulullah SAW, dua *atsar* dari para sahabat Baginda SAW dan *ijma'* para ulama. Jika disimpulkan maka dalil-dalil yang sama-sama digunakan oleh keduanya dalam penetapan fatwa tentang pembiayaan *musyārahah* ini adalah kutipan-kutipan dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* ulama atas bolehnya *musyārahah*. *Ijma'* ulama ini didasari dengan adanya *taqrir* Nabi SAW terhadap kegiatan *musyārahah* yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.¹⁵⁵

¹⁵⁴MPS BNM, *Resolusi Syariah dalam Keuangan Islam Edisi Kedua...*, hlm. 42.

¹⁵⁵Rahmani Timorita Yulianti, "Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah", *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. I, No. 1, Juli 2007, hlm. 66.

Hanya saja perbedaan dalam hal ini adalah DSN MUI mencantumkan satu kaidah fikih didalam fatwanya, tetapi kaidah tersebut tidak terdapat dalam resolusi MPS BNM tentang *musyarakah*. Kaidah *kulliyah* tersebut sebagai satu pelengkap bagi dalil-dalil yang telah terdahulu disebutkan sebelumnya.¹⁵⁶ Analisis keatas setiap dalil tersebut adalah seperti berikut :-

1. Dalil dari Al-Quran

Terdapat dua ayat Al-Qur'an yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional yaitu tentang kewajiban memenuhi akad yang telah disepakati dan keabsahan *musyarakah*. Sedangkan MPS BNM hanya mencantumkan satu ayat Al-Quran tentang kebolehan akad *musyarakah* sebagai dasar utama dalam menetapkan fatwa tentang pembiayaan *musyarakah*. Ayat tersebut adalah seperti berikut :

a. Firman Allah SWT

QS. Shād (38): 24

...وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

Artinya: “...*Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu...*”

Pengertian kata “الْخُلَطَاءُ” dalam ayat di atas membawa maksud mereka yang melakukan perkongsian. Dan perkongsian yang dimaksudkan dalam ayat ini menurut para ulama’ seperti Ibnu Qudamah dan ‘Abdul ‘Aziz Khayyat adalah perkongsian berdasarkan

¹⁵⁶DSN MUI, *Fatwa DSN MUI NO 8 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah...*, hlm. 2.

akad (transaksi)¹⁵⁷ Dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, berdasarkan ayat ini juga, *musyārahah* merupakan syariat lama yang tidak dimansuhkan. Amalan ini telah sedia ada sejak zaman sebelumnya dan tidak ditegah oleh Nabi Muhammad SAW.¹⁵⁸ Namun, *musyārahah* perlu dilaksanakan secara adil dan berlandaskan syariat. Ayat ini telah dicantumkan oleh DSN MUI dan MPS BNM di dalam keputusan mereka.

b. Firman Allah SWT

QS. Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman !, penuhilah ‘aqad-‘aqad itu...”

Aqad jamaknya ‘*uqūd*, yang berarti *al rabthu* yaitu ikatan atau simpulan.¹⁵⁹ Dalam *Kamus Munawwir* dinyatakan antara kalimat searti dengan ‘*aqad* ialah kesepakatan, kontrak dan transaksi.¹⁶⁰ Menurut Nazih Hammad pengertian istilahnya terbagi kepada dua. Pertama ikatan yang terhasil dari dua ucapan yang menyebabkan lahirnya konsekuensi yang sah disisi syara’. Kedua akad adalah terjadinya transaksi dalam yang terzahir dalam bentuk kontrak dan komitmen para pihak.¹⁶¹ Jadi akad bagian dari perbuatan hukum yang

¹⁵⁷ Abdul ‘Aziz Khayyat, *Al-Syari‘at fi al-Syariat al-Islamiah wa Qānūn*, Juz 1, (Beirut: Muassasah Risalah, 1994), hlm. 59.

¹⁵⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islami wa-Adillatuh...*, hlm. 793.

¹⁵⁹ Nazih Hammad, *Mu‘jam Muṣṭalahāt al-Malīyah* (Damaskus: Dar Qalam, 2008), hlm. 320.

¹⁶⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia...*, hlm. 953.

¹⁶¹ Nazih Hammad, *Mu‘jam Muṣṭalahāt al-Malīyah...*, hlm. 321.

menimbulkan perikatan atau konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak lain yang terikat sehingga hukumnya wajib memenuhi isi perjanjian akad tersebut.

Menurut ‘Ali al-Shābūni, penafsiran QS. Al-Maidah: 1 disisi jumbuh ulama berisi seruan untuk orang-orang yang beriman menunaikan akad-akad perjanjian yang telah dibuatnya baik berupa akad muamalah maupun akad syari’ah meliputi tanggungjawab dan kewajiban mereka seperti dalam hal halal dan haram.¹⁶² Wahbah Zuhaili menyatakan ayat ini sebagai sandaran para ulama tentang keharusan para pihak untuk menunaikan janji akad dan konsekuensi yang timbul darinya.¹⁶³ Jika diteliti pengertian dari QS. Al-Maidah: 1 dan QS. Shād ayat 24, telah menunjukkan dasar kebolehan bermuamalah dalam bentuk akad *musyārahah* sesuai penafsiran yang telah dikemukakan oleh para ulama.

2. Hadis Rasulullah SAW

DSN MUI mencantumkan sebanyak tiga hadis Rasulullah SAW sebagai sandaran hadis dalam fatwanya yaitu satu hadis *qudsi*, satu hadis *qauli* dan bentuk *taqrir* baginda SAW terhadap kegiatan *musyārahah* yang dilakukan masyarakat ketika itu. Sebaliknya MPS BNM hanya menyebutkan *taqrir* baginda SAW terhadap kegiatan *musyārahah* seperti tergambar dalam hadis tentang *musyārahah* yang diriwayatkan oleh Imam Daruquthni. Juga dua *atsar* yang diriwayatkan dari para sahabat tentang penentuan kadar keuntungan dan kerugian para pihak dalam akad *musyārahah*. Secara umumnya

¹⁶²Muhammad ‘Ali al-Shabūni, *Rawa‘iu Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam* (Suriyah: Maktabah al-Ghazali, 1980), hlm. 527.

¹⁶³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islami wa-Adillatuh*, Juz 4, (Damask: Dar Fikr, 1985), hlm. 90.

fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI dan MPS BNM tentang pembiayaan *musyārahah* telah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dan praktik baginda SAW yang membenarkan transaksi *musyārahah* seperti yang telah disebutkan oleh al-Zaylai', Ibnu Hajar al-Asqalani, al-Tirmidzi dan al-Daruquthni dan Abdul Razzaq al-Shan'ani Penjelasannya adalah seperti berikut :-

a. Hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A dan terdapat dalam fatwa DSN MUI dan MPS BNM tentang *musyārahah* :

"الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه السلام قال " إن الله عز وجل يقول:

أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا" رواه أبو داود .

Artinya : *"Aku menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka Aku keluar dari penyertaan tersebut"*. (HR. Abu Daud Hadis No: 3383- Hadis ini tidak dikomentari oleh Abu Daud dan dinilai Sahih oleh Al-Hakim al-Naisāburi dalam *Al-Mustadrak*- Lihat hal. 25-26).

b. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf yang terdapat dalam fatwa DSN MUI sahaja :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka

kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”¹⁶⁴ (HR Tirmidzi No. 1352 : Hasan Sahih).

c. Rasulullah SAW membenarkannya seperti dalam sabda baginda SAW yang dicantumkan dalam resolusi MPS BNM tentang *musyarakah*:

"يُدَاللَّهُ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ رَفَعَهَا عَنْهُمَا".

“Pertolongan Allah SWT ke atas dua orang yang bersyarikat adalah selagi mana salah seorang daripada kedua-duanya tidak mengkhianati rakan kongsinya. Sekiranya salah seorang mengkhianati rakan kongsinya maka Allah SWT akan mengangkat pertolongan-Nya daripada kedua-duanya.”¹⁶⁵

d. Terdapat riwayat sahabat Rasulullah SAW yang menyatakan tentang kebolehan *musyarakah* yang dibawakan oleh MPS BNM seperti yang berikut:

الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطًا، وَالْوُضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

“Keuntungan adalah berdasarkan apa yang telah disyaratkan dan kerugian adalah berdasarkan kadar harta (pihak yang berkongsi).”¹⁶⁶

الْوُضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ

“Kerugian adalah berdasarkan kadar harta, dan keuntungan adalah berdasarkan apa yang disyaratkan.”¹⁶⁷

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI dan MPS BNM tentang pembiayaan *musyarakah* telah sesuai dengan hadis Rasulullah

¹⁶⁴ Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*(Mesir: Dar Kutb Ilmiah, t.t), hlm 635.

¹⁶⁵ Al-Daruqutni, *Sunan al-Daruqutni*, Juz 3,(Muasasah Risalah, 2004), hlm. 442, no. 2934.

¹⁶⁶ Abdullah Yusuf al-Zaylai’, *Nasb al-Rayah li Ahadis Hidayah*, Juz 3, (S.Afrika: Mu’assasah al-Rayyan, 1997), hlm. 475.

¹⁶⁷ Abdul Razzaq al-Shan`ani, *Musannaf Abdul Razzaq*, Juz 8, (S.Afrika: Majlis Ilmi, 1983),hlm. 248.

SAW dan praktik baginda SAW yang membenarkan transaksi *musyārahah*. Juga sejalan dengan yang telah disebutkan oleh al-Zaylai', Ibnu Hajar al-Asqalani, al-Tirmidzi dan al-Daruquthni dan Abdul Razzaq al-Shan'ani dalam kitab mereka. Namun hadis yang digunakan oleh DSN MUI dan MPS BNM tersebut jika diteliti masih bersifat luas dan global. Hal itu dapat ditinjau dari matan hadis yang menjelaskan dasar dibolehkannya praktik *musyārahah*, sebatas sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Juga sebatas etika dalam bertransaksi *musyārahah* yaitu dorongan untuk bersyarikat dan cegahan dari berbuat khianat.¹⁶⁸

Hanya saja pada hadis kedua dalam fatwa DSN MUI memberikan kebolehan para pihak membuat syarat-syarat yang halal dalam transaksi akad dan keharusan memenuhinya.¹⁶⁹ Selanjutnya pada dua *atsar* yang tercantum dalam resolusi MPS BNM terdapat sedikit gambaran tentang mekanisme pembagian nisbah keuntungan dan tanggungan kerugian. Akan tetapi redaksinya belum mengarah kepada perincian substansi fatwa yang ditetapkan. Sehingga diperlukan hadis-hadis dan keterangan lain yang lebih detil ketika menjelaskan mengenai bentuk pembiayaan *musyārahah*.

3. *Ijma'*

Jumhur ulama sepakat membolehkan akad *musyārahah*. Demikian juga dapat dikatakan masyarakat dunia telah mempraktikkannya sejak dahulu lagi. Praktik tersebut dinilai sebagai salah satu metode bagi memenuhi kebutuhan manusia dalam

¹⁶⁸Muhammad bin Ismail al-Shan'ani, *Subulussalam Syarh Bulugh Maram*, Juz 3, (Riyadh: Maktabah Musthofa, 1995), hlm. 1190.

¹⁶⁹Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi...*, hadis nomor 1352.

kehidupan bermasyarakat. Status *ijma'* yang digunakan DSN MUI bersandarkan pada pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* bahwa, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.¹⁷⁰ Sedang dalam fatwa MPS BNM hanya disebutkan konsesus para ulama atas kebolehan akad ini tanpa menyebut sandaran bagi status *ijma'* tersebut. Perlu dijelaskan bahwa penyebutan status akad *musyarakah* sebagai *ijma'* tidak hanya disebut oleh Ibnu Qudamah bahkan juga para ulama lain seperti Ibnu Munzir al-Naisaburi,¹⁷¹ Ibnu Rusyd,¹⁷² Wahbah Zuhaili¹⁷³ dan para ulama lain didalam kitab-kitab yang mu'tabar.

4. Kaidah Fikih

Penggunaan kaidah fikih terdapat didalam fatwa DSN MUI dan tidak ada dalam resolusi MPS BNM tentang *musyarakah*. Kaidahnya adalah seperti berikut :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁷⁴

Kaidah ini adalah salah satu kaidah pokok bahwa dalam hal yang bersifat muamalah, segala hal atau tindakan hukum asalnya

¹⁷⁰Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 7, (Riyadh: Dar A'lim Kutub,1997),hlm. 109.

¹⁷¹Ibnu Munzir al-Naisābūri, *Al-Ijmā* (Ajmān: Maktabah Furqan, 1999),hlm. 137.

¹⁷² Ibn Rusyd Al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Muqtasid...*, hlm. 109.

¹⁷³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh...*,hlm. 793.

¹⁷⁴Athiyah 'Adlan, *Mausuah Qawāid Fiqhyah Muamalah* (Mesir: Dar Iman, 2007),hlm. 134

dibolehkan (mubah). Ia akan berubah menjadi terlarang (haram) jika terdapat dalil hukum yang mengharamkan suatu tindakan tersebut. Akad *musyarakah* termasuk satu bentuk akad *musamma* dalam muamalah, sehingga hukum asalnya adalah dibolehkan.

3.3.2 Metode-metode *Istinbat al-Hukmi* yang Digunakan

Terdapat beberapa metode *istinbāt al-hukmi* menurut para ulama seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah, Salam Madkur, Abdul Karim Zaidan dan Wahbah Zuhaili di dalam kitab mereka. Menurut Salam Madkur secara garis besar ada dua macam perangkat atau metode yang dikembangkan oleh para ahli hukum Islam dalam rangka *istinbatnya* yaitu metode *istinbat* yang dilakukan dengan cara menggali hukum kepada *naş* secara langsung. Kedua, adalah metode yang dilakukan dengan cara menggali hukum dengan cara mengembalikan kepada *naş* secara tidak langsung, yaitu melalui kaidah-kaidah umum yang dikenal dengan *al-qawāid al-fiqhiyyah*.¹⁷⁵

Menurut Satria Effendi metode *istinbat* dapat dibagi kepada tiga bagian yaitu dari segi kebahasaan, dari segi *maqāsid* (tujuan) syari'ah dan dari segi harmonisasi beberapa dalil yang bertentangan.¹⁷⁶ Hal ini sesuai dengan konsepsi yang dinyatakan oleh Abdul Karim Zaidan dalam kitab *Al-Wajiz*.¹⁷⁷ Sedang menurut Ma'aruf Amin kaidah *istinbat* dalam berfatwa terbagi kepada tiga yaitu metode *bayāni* (analisa kebahasaan), *metode ta'alili* dan metode *istislāhi*.

¹⁷⁵Muhammad Salam Madkūr, *Madkhal fi al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Dar Kitab Hadis, 1996), hlm. 275-290.

¹⁷⁶Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 177.

¹⁷⁷Abdul Karim Zaidan, *Al-Wājiz fi Uşūl al-Fiqh...*, hlm. 275.

Metode *bayani*, yaitu melalui penafsiran terhadap kata yang digunakan dalam *naş* dan susunan kalimatnya sendiri (*al-qawa'id al lughawiyyah* atau *dilalat al-lafzi*) dan kaidah-kaidah yang dipakai sebagaimana yang digunakan oleh ulama pakar bahasa Arab. Metode *ta'alili* digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam *naş* baik secara *qath'i* maupun *zanni* dan juga tidak ada *ijma'* yang menetapkan hukumnya. Namun hukumnya tersirat dalam dalil yang ada. Sedang dimaksudkan dengan *istislāhi* adalah penetapan suatu ketentuan berdasarkan asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, karena untuk masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus. Seringkali metode ini baru digunakan apabila metode *bayāni* dan *ta''līlī* tidak dapat dilakukan.¹⁷⁸

Menurut pedoman penetapan fatwa MUI, setiap masalah yang dibahas di komisi fatwa (termasuk fatwa tentang ekonomi syariah) harus didasarkan kepada *naş* al-Quran, *sunnah*, *ijma'* dan *qiyās*.¹⁷⁹ Selanjutnya ditinjau dengan seksama pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan beserta dalil-dalilnya. Jika telah jelas hukumnya dalam *naş qath'i*, maka disampaikannya seperti yang tertera dalam *naş*. Ketika terjadi perbedaan pendapat dilakukan metode *al-Jam'u wa al-Tawfiq* (penemuan titik temu antara pendapat-pendapat).

Selanjutnya jika usaha ini tidak berhasil, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqāranah al-*

¹⁷⁸Ma'aruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (Depok: Elsas, 2008), hlm. 44-46.

¹⁷⁹MUI, *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: MUI, 1997).

madzāhib dengan menggunakan kaidah fikih perbandingan (*uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*). Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat ulama tentang hukumnya di kalangan mazhab, dan tidak dapat dilakukan *ilhāqi* karena tidak ada pendapat ulama, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihād* kolektif (*jama'i*) melalui metode *manhaji*, yaitu metode *bayani*, *ta'lili* dan *isitislahi*. Fatwa juga perlu senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*maṣālih al-'ammah*) dan tujuan syariah (*maqāsid al-shari'ah*).¹⁸⁰

Lebih jelas menurut Ma'aruf Amin, keberadaan metode dalam penetapan fatwa adalah sangat penting. Jika tidak maka keputusan hukum dilihat mempunyai kekurangan dari segi kekuatan argumentasinya. Oleh kerananya diperlukan suatu pendekatan atau manhaj yang jelas ketika menetapkan suatu fatwa. Menurut beliau, salah satu contoh metode penetapan fatwa adalah sebagaimana yang dikembangkan di lingkungan Komisi Fatwa MUI. Pendekatan tersebut dibahagikan kepada tiga yaitu pendekatan *Naṣ Qathi'*, pendekatan *Qauli* dan pendekatan *Manhaji*.¹⁸¹

Pendekatan *Naṣ Qathi'* dilakukan dengan berpegang kepada naṣ al-Quran atau Hadis apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam *naṣ* Al-Quran ataupun Hadis secara jelas. Pendekatan *Qauli* adalah pendekatan proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fikih yang terkemuka (*al-kutub mu'tabarah*). Ketiganya adalah pendekatan

¹⁸⁰Akhyar Gayo dkk, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa Mui Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan ES* (Jakarta: BPHN Kemenkumham, 2011), hlm. 46. Lihat juga: Asrorun Ni'am Sholeh, *Pedoman Dan Prosedur Penetapan Fatwa*, (Jakarta: MUI, 2017).

¹⁸¹Ma'aruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam...*, hlm. 268.

Manhaji yaitu pendekatan dalam proses fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qawāid al-uṣūliyyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab ketika merumuskan hukum. Pendekatan ini dilakukan secara kolektif dengan menggunakan metode *al-jam'u wa al-taufiq, tarjihi, ilhaqi* dan *istinbāthi*.¹⁸²

Secara ringkas metode atau pendekatan yang diguna pakai oleh MPS-BNM juga MPS Suruhanjaya Sekuriti dalam penetapan fatwa atau resolusinya adalah dengan merujuk kepada sumber utama dan sumber kedua.¹⁸³ Sumber utama ialah dari Al-Quran dan al-Sunnah. Sumber kedua (sekunder) ialah ijtihad yang terdiri daripada *ijma', qiyās, maslahah, istihsān, istishāb, sadd dzari'ah, 'urf, siyāsah al-syar'iyyah, ta'wil, istiqlal* dan *tafiiq*. Dalam implementasinya, MPS-BNM turut mendukung pendekatan *maqāsid al-syari'ah* dan memelihara kemurniannya.¹⁸⁴ Selanjutnya akan dianalisis satu persatu pendekatan atau metode yang digunakan DSN MUI dan MPS BNM dalam ketentuan fatwa tentang *musyārahah* dengan melihat setiap ketentuan yang telah digariskan didalamnya.

Daripada semua metode *istinbāth* dan penetapan hukum yang telah dinyatakan oleh Salam Madkur, Satria Effendi, Ma'aruf Amin serta pedoman penetapan fatwa MUI dan MPS BNM, penulis cenderung menjelaskan proses penetapan hukum tentang *musyārahah* ini berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan oleh Ma'aruf Amin

¹⁸²Ma'aruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam...*, hlm. 269.

¹⁸³Suruhanjaya Sekuriti, Keputusan MPS Edisi Kedua, (Malaysia: SS, 2006), hlm. 21.

¹⁸⁴Suhaimi Mohd Yusof dan Ahmad Hazim Alias, Pendekatan Membuat Keputusan Syariah dalam Kewangan Islam, *Jurnal Muamalat*, Bil. 1, 2008, hlm. 52-53.

dan tatanan yang termuat dalam pedoman penetapan fatwa MUI. Dalam analisis fatwa tentang *musyarakah* ini, akan dijelaskan mulai DSN MUI dan MPS BNM sebagai subjek (pembuat fatwa) dan proses penetapannya yang terdiri daripada pendekatan *Nas Qathi*, pendekatan *Qauli* dan pendekatan *Manhaji*. Terdapat relasi antara pendekatan dan fatwa yang telah dihasilkan. Dimaksudkan dengan pendekatan *Nas Qathi* dengan berpegang kepada *nas* Al-Quran atau Hadis apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam *nas* Al-Quran ataupun Hadis. Ianya dapat dilihat ketika fatwa DSN MUI dan MPS BNM membolehkan transaksi pembiayaan *musyarakah*. Dalam hal fatwa *musyarakah* ini, dalil-dalil kebolehan yang ada difahami dengan menggunakan metode *bayāni* (analisa kebahasaan).

Pendekatan *Qauli* dapat dilihat berdasarkan butiran ketentuan-ketentuan dalam fatwa yang menyangkut *sighah* akad, para pihak yang berakad, dan objek akad yang masing-masing dapat ditelusuri keberadaan dalam kitab-kitab mu'tabarah. Sedang pendekatan *Manhaji* dalam fatwa *musyarakah* DSN MUI dan MPS BNM dapat dilihat ketika kedua-dua fatwa menjelaskan kebolehan jaminan dalam akad *musyarakah* bagi menghindari kecurangan salah satu pihak yang berakad. Ianya didasarkan pendekatan *masālih mursalah*. Keterangan secara terperinci tentang subjek dan metode *istinbāt al-hukmi* yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut :-

1. Sifat dan jumlah yang terlibat dalam membuat keputusan hukum.

Berdasarkan pedoman penetapan fatwa MUI, proses fatwa dilakukan secara kolektif kelembagaan.¹⁸⁵ Demikian juga oleh MPS

¹⁸⁵Asrorun Ni'am Sholeh, *Pedoman Prosedur Penetapan Fatwa ...*, hlm. 4.

BNM.¹⁸⁶ Menurut Satria Effendi *ijtihad* dilihat dari jumlah pelakunya dibagi menjadi dua yaitu *ijtihad fardi* dan *jama'i*. Harus diketahui bahwa posisi kedua-dua lembaga fatwa ini dalam menetapkan fatwanya menggunakan pendekatan *ijtihad* kolektif (*al-fatwa al-jama'i*). Ini sesuai dengan sifatnya sebagai suatu organisasi fatwa yang dianggotai oleh sejumlah ilmuawan yang kompeten dan berotoritas dalam merumuskan suatu hukum syara'. Menurut Satria Effendi *ijtihad* kolektif merupakan kegiatan *ijtihad* yang melibatkan berbagai disiplin ilmu di samping ilmu fikih itu sendiri sesuai permasalahan yang akan dibahas.¹⁸⁷

Menurutnya lagi, fatwa yang bersifat kolektif dipandang sebagai bentuk *ijtihad* modern yang dianggap ideal, karena proses perumusannya didasarkan pada berbagai sudut pandang keilmuan yang lebih mendekati kebenaran. *Ijtihad* kolektif dipandang perlu oleh karena permasalahan-permasalahan yang muncul dewasa ini semakin kompleks. Pemecahannya memerlukan pendekatan yang tidak hanya dari aspek hukum semata-mata, melainkan perlunya dukungan berbagai macam disiplin ilmu seperti ilmu kesehatan, psikologi, ekonomi dan lainnya.¹⁸⁸

2. Pendekatan penetapan hukum

i. Pendekatan *Naş Qathi'*

Menurut Ma'aruf Amin pendekatan *Naş Qathi'* dilakukan dengan berpegang kepada *naş* Al-Quran atau Hadis apabila masalah

¹⁸⁶Suhaimi Mohd Yusof dan Ahmad Hazim Alias, Pendekatan Membuat Keputusan Syariah dalam Kewangan Islam, *Jurnal Muamalat*, Bil. 1, 2008, hlm. 60.

¹⁸⁷Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*, hlm. 258.

¹⁸⁸Soleh Hasan Wahid, "Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah Dsn-Mui dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" *Jurnal Ahkam*, Vol 4, No 2, November 2016. hlm. 179.

yang ditetapkan terdapat dalam *naş* Al-Quran ataupun Hadis secara jelas. Dalam hal fatwa *musyārah* ini, dalil-dalil yang ada difahami dengan menggunakan metode *bayāni* (analisa kebahasaan).

a. Jika ditinjau dari segi metode *istinbāt* hukumnya, dalam menetapkan kebolehan bagi melakukan transaksi pembiayaan *musyārah* dalam fatwa mereka, Dewan Syariah Nasional (DSN) dan MPS BNM menggunakan pola *ijtihād bayāni*.¹⁸⁹ Keizinan untuk melakukan transaksi *musyārah* berdasarkan kebolehan yang telah diberikan oleh syara' sebagaimana yang difahami secara jelas dari kalimat-kalimat dalam dua dalil Al-Quran dan empat dalil Hadis yang telah disebutkan terdahulu. Secara gamblang membenarkan umat Islam untuk melakukan akad akad *musyārah*.

b. DSN MUI ketika memberikan keizinan kepada para pihak untuk membuat sebarang persyaratan-persyaratan perkongsian yang bersifat halal dan mubah, menyandarkan pendapatnya kepada hadis riwayat Imam Tirmidzi yang bermaksud "*Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkanyang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram*".¹⁹⁰

Hadis di atas berisi prinsip umum dalam muamalah tentang kebebasan membuat perjanjian atau akad. Seorang muslim bebas membuat perdamaian atau perjanjian dengan muslim lain, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang

¹⁸⁹Ma'aruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam...*, hlm. 44.

¹⁹⁰Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi...*, hadis nomor 1352.

halal. Jika kedua belah pihak sudah membuat persyaratan atau perjanjian, maka keduanya menjadi terikat untuk memenuhinya. Hadis ini dinilai *hasan sahih* oleh ulama muhadditsin dan sah dijadikan hujjah atau dalil hukum.¹⁹¹

Demikian juga MPS BNM menyandarkan dan menguatkan perincian tentang ketentuan-ketentuan pembagian nisbah pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan riwayat daripada para sahabat yang bermaksud “*Keuntungan adalah berdasarkan apa yang telah disyaratkan dan kerugian adalah berdasarkan kadar harta (pihak yang berkongsi).*”¹⁹² Dan ketentuan ini, baik dalam akad *musyarakah* maupun *muḍārabah* diterima secara sepakat oleh para ulama sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Munzir al-Naisaburi.¹⁹³ Disimpulkan bahwa Fatwa DSN dan MPS membolehkan penetapan syarat tambahan dalam bentuk pengaturan hak dan kewajiban pihak yang berkontrak, penelesaian jaminan, dan pengikatan janji.

ii. Pendekatan *Qaūli*

Menurut Ma’aruf Amin ianya suatu pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkan pada pendapat para Imam Mazhab dalam kitab-kitab fikih terkemuka (*al-kutub al-mu’tabarah*).¹⁹⁴ Pendekatan ini dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fikih tersebut, dan hanya terdapat satu pendapat (*qaūl*) sahaja, kecuali jika pendapat (*qaūl*) yang

¹⁹¹ Ahmad Muhammad al-Zarqa’, *Syarh Qawāid Al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar Qalam, 1979), hlm. 419.

¹⁹² Abdullah Yusuf al-Zaylai’, *Nasb al-Rayah li Ahadis Hidayah*, Juz 3, (S. Afrika: Mu’assasah al-Rayyan, 1997), hlm. 475.

¹⁹³ Ibnu Munzir al-Naisaburi, *Al-Ijmā’* (Ajmān: Maktabah Furqan, 1999), hlm. 140.

¹⁹⁴ Ma’aruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam...*, hlm. 269.

ada dikira tidak sesuai lagi untuk dipegangi karena sangat sukar untuk dilaksanakan (*ta'assur, ta'adzdzur* atau *ṣu'ūbah al-'amāl*) , atau karena alasan hukumnya (*'illah*) berubah. Dalam kondisi seperti ini maka dilakukan telaah ulang (*i'adatun nazhar*)

Penerapan pendekatan ini dapat dilihat dalam fatwa DSN MUI dan MPS BNM yang membenarkan penyertaan modal *musyārahah* berbentuk selain alat tukaran berharga secara mutlak seperti uang tunai, emas dan perak. Ketentuan ini merupakan suatu yang telah disyaratkan oleh jumbuh ulama sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Munzir.¹⁹⁵ Sebaliknya menurut fatwa DSN MUI dan MPS BNM, dibenarkan untuk para pihak menyertakan modal berbentuk aset perdagangan seperti barang-barang, properti dan lain sebagainya dalam *musyārahah*. Hal ini dengan ketentuan aset tersebut haruslah dinilai terlebih dahulu dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Kebolehan hal tersebut berdasarkan pendapat Imam Malik yang membenarkan hal demikian. Menurut pendapatnya, maksud yang diinginkan daripada *musyārahah* adalah suatu akad atas suatu bentuk modal yang diketahui (*ra'sul al-māl ma'alūm*) maka disamakan posisi (barang) tersebut dengan uang tunai.¹⁹⁶

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Fatwa DSN MUI dan MPS BNM tentang pembiayaan *musyārahah* adalah *musyārahah amwāl* karena mensyaratkan para pihak untuk berkontribusi dana. Sedang jika dilihat dari kesetaraan modal, kebenaran yang diberikan dalam fatwa ini berbentuk *musyārahah 'inan* disisi *jumbuh ulama'* yaitu sumbangan tidak harus sama tetapi sesuai kesepakatan para

¹⁹⁵ Ibnu Munzir al-Naisaburi, *Al-Ijma'...*, hlm. 138.

¹⁹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi waAdillatuh...*, hlm. 808.

pihak. Dalam hal pembagian keuntungan diputuskan sesuai kesepakatan dengan ketentuan bentuk *musyārahah 'inan* itu sendiri yaitu tiada keharusan persamaan dalam modal, kerja, jenis usaha dan keuntungan. Kemudian ketika menetapkan pembagian kerugian, DSN MUI dan MPS BNM memutuskan sesuai dengan kesepakatan *jumhur* bahwa pembagian kerugian sesuai dengan proporsi modal masing-masing mitra.¹⁹⁷

iii. Pendekatan *Manhāji*

Menurut Ma'aruf Amin pendekatan *Manhāji* adalah pendekatan dalam proses fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qawā'id al-uṣuliyyah*) dan metodologi (*manhaj*) yang dikembangkan oleh imam mazhab ketika merumuskan hukum. Pendekatan ini dilakukan secara kolektif dengan menggunakan metode *al-jam'u wa al-taufiq, tarjihi, ilhaqi* dan *istinbāti*.¹⁹⁸ Prosedur operasional metode *manhajiy* adalah dengan mempraktekkan *qawā'id uṣhuliyyah* (kaidah-kaidah uṣūl fiqh) dan *qawā'id fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fiqh).¹⁹⁹

Dalam prosedur fatwa MUI disebutkan, pendekatan *manhāji* dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (*ijtihād jama'i*), dengan mempertemukan pendapat yang berbeda (*al-Jam'u wat taufiq*), memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya (*tarjih*), menganalogikan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (*Ilhāqi*) dan *Istinbāti*.²⁰⁰

¹⁹⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*..., hlm. 813.

¹⁹⁸Ma'aruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*..., hlm. 269.

¹⁹⁹Lutfan Muntaqo, *Fiqh Sosial: Pemikiran KH. M.A. Sahal Mahfudz*, *Jurnal Manarul Quran*, Juni 2016, hlm. 78.

²⁰⁰Asrorun Ni'am Sholeh, *Pedoman Prosedur Penetapan Fatwa*..., hlm. 7.

Metode *istinbāti* dilakukan dengan memberlakukan metode *qiyāsi*, *istislahi*, *istihsani* dan *sadd dzariah*.²⁰¹

Adapun prosedur *beristinbāt* secara *manhaji* (metodologis) menurut Sahal Mahfud adalah dengan cara melakukan verifikasi persoalan-persoalan yang tergolong *uṣūl* (pokok) dan permasalahan yang termasuk *furū'* (cabang) dengan terlebih dahulu melakukan klasifikasi apakah termasuk *darūriyyah* (kebutuhan mendesak), *hājjiyyah* (kebutuhan sekunder), atau *taḥsīniyyah* (kebutuhan tambahan).²⁰² Penerapan pendekatan ini dalam fatwa DSN MUI dan MPS BNM dapat dilihat dalam dua hal. Salah satu daripadanya menggunakan pendekatan *masalah mursalah* juga menggunakan pendekatan *al-Qawāid al-Fiqhiyyah* :

a. Jaminan untuk menghindari terjadinya penyimpangan

Metode selanjutnya adalah *masalah mursalah*. Hal ini terlihat daripada kebolehan para pihak untuk menetapkan jaminan dalam akad *musyarakah* seperti yang telah dinyatakan dalam poin Fatwa DSN MUI seperti berikut :-

“*Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.*”

Dalam Resolusi MPS BNM dinyatakan sebagai berikut :-

“*Tiada jaminan pada modal. Jaminan hanya boleh dibuat dalam kes kecuiaan dan pelanggaran syarat-syarat perjanjian musyarakah;*”

²⁰¹Ma'aruf Amin, *Fatwadalam Sistem Hukum Islam...*, hlm. 271.

²⁰²Idris, Pendekatan Manhāji sebagai Upaya Penemuan Hukum Islam, *Jurnal Al-Afkar*, Vol. I, No. 2, 2016, hlm. 9.

Dilihat segi tujuannya yaitu bermaksud untuk berjaga-jaga atau menghindari adanya tindak penyelewengan yang dilakukan pemegang amanah, yang akan membawa dampak tidak terpenuhinya tujuan akad. Hal ini didasarkan keumuman firman Allah SWT dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 283 tentang ketentuan sekaligus tuntunan agar ketika seseorang melaksanakan kegiatan akad transaksi yang tidak terdapat juru tulis, maka sebaiknya mengadakan barang sebagai tanggungan seperti dinyatakan oleh Ali al-Shabūni.²⁰³ Menurut Nazih Hammad, hal ini sangat penting bagi setiap orang yang melakukan akad, karena diharap akan menghasilkan jaminan kepastian terhadap pemenuhan kewajiban kepada subyek akad.²⁰⁴

b. Penggunaan kaidah fikih

Menurut Mustafa al-Zarqa' dimaksudkan dengan kaidah-kaidah fikih adalah kaidah yang bersifat umum, yang meliputi seluruh masalah-masalah fiqh secara terperinci.²⁰⁵ Adapun kepentingan kaidah-kaidah ini dalam tatanan hukum syariah telah dijelaskan oleh al-Qarafi bahwa sesungguhnya syariat Islam itu terdiri dari asas yang pokok dan yang bersifat cabang. Dua asas yang utama tersebut adalah uşul fiqh dan kaidah-kaidah fiqhiyyah.²⁰⁶ Penggunaan kaidah fikih terdapat dalam fatwa *musyārahah* yang diputuskan oleh DSN MUI akan tetapi tidak terdapat dalam resolusi MPS BNM tentang pembiayaan *musyārahah*. Kaidahnya seperti berikut :

²⁰³Muhammad Ali as-Shabuni, *Tafsir al-Sofwah al-Tafsir*(Beirut:Dar Quran Karim, 1981),hlm. 179.

²⁰⁴Nazih Hammad, *Fiqh Muamalah Māliyah* (Damaskus: Dar Qalam, 2007), hlm. 270-285.

²⁰⁵Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhāl al-Fiqhī al-Amm* (Damaskus: Dar Qalam, 2004),hlm. 965.

²⁰⁶Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhāl al-Fiqhī al-Amm...*,hlm. 976-977.

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Menurut ‘Athiyah ‘Adlan, hukum asal dari akad setiap transaksi muamalah apapun bentuk dan modelnya, adalah pada asalnya mubah (boleh), dengan ketentuan selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya, atau akad tersebut tidak menyalahi konsep aturan dari dalil-dalil umum yang telah ada.²⁰⁷ Menurut Atho Muzdhar terdapat keterkaitan *maqāsid syari‘ah, maslahah*, kaidah fikih, *ijtihad* dan fatwa. *Ijtihad* yang melahirkan fatwa sering kali mempertimbangkan aspek *maqāsid syariah* yang salah satu intinya adalah *maslahah*. Sedangkan instrumen *maslahah* adalah pengaplikasian kaidah-kaidah fikih. Artinya kaidah-kaidah ini sangat diperlukan dalam melakukan *ijtihad* untuk menetapkan fatwa.²⁰⁸

Dapat juga disimpulkan bahwa fatwa DSN MUI tentang *musyarakah* bersifat lebih terperinci berbanding fatwa MPS BNM. Baik dari aspek dalil-dalil yang dicantumkan ke dalam fatwanya seperti yang telah dahulu disebutkan maupun ketentuan-ketentuan yang menyangkut akad, para pihak, objek akad dan lain sebagainya. Sedangkan fatwa MPS lebih bersifat sederhana mengingat ianya dibatasi hanya sebagai respons bagi permasalahan yang telah diajukan

²⁰⁷ ‘Athiyah ‘Adlan, *Mausuah Qawāid Fiqhiyah Muamalah...*, hlm. 134

²⁰⁸ Atho Muzdhar, Revitalisasi *Maqāsid Syariah* dalam Pengembangan ES di Indonesia (Studi Kasus Atas Fatwa DSN MUI 2000-2006) *Jurnal Indo-Islamika*, Vol 4, No 1, Jan-Juni 2014, hlm. 7-9.

kepada badan tersebut. Akan tetapi hal tersebut kemudiannya diperincikan lagi kedalam beberapa aturan pendukung lainnya.

Tabel. 3.1.

Perbedaan Fatwa DSN MUI dan MPS BNM tentang *Musyārakah*

Fatwa <i>Musyārakah</i>	Dewan Syariah Nasional	Majlis Penasihat Syariah
Definisi	Adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi berbentuk dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko darinya akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.	Kontrak perkongsian antara dua pihak atau lebih untuk membiayai suatu usaha perniagaan dan semua pihak yang terlibat sumbang modal sama ada dalam bentuk tunai atau lain-lain. Keuntungan hasil dari perkongsian tersebut seterusnya akan dikongsi berdasarkan nisbah yang dipersetujui, manakala kerugian akan ditanggung bersama berdasarkan nisbah sumbangan modal
Pelaku	Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan. Melaksanakan kerja sebagai wakil mitra yang lain.	Semua pihak perlu menyumbangkan modal. Institusi keuangan Islam sebagai mitra/ pembiaya boleh meletakkan syarat-syarat tertentu.
Modal	Modal harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.	Dalam bentuk uang tunai atau lain-lain.

	<p>Boleh berbentuk aset perdagangan, seperti barang-barang, properti dan lain sebagainya. (Dinilai terlebih dahulu dan disepakati para mitra).</p> <p>Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadihkan modal <i>musyarakah</i> kepada pihak lain, kecuali dengan kesepakatan.</p>	<p>Harus dinilai terlebih dahulu jika dalam bentuk aset perdagangan.</p> <p>Syarat pembelian bagian mana-mana saham rakan kongsi adalah berdasarkan harga pasar (<i>qimah suqiyyah</i>), atau harga yang dipersetujui bersama dan bukannya harga nominal (<i>qimah ismiyyah</i>).</p>
Pembagian Keuntungan	<p>Secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan, tidak ada jumlah tetap yang ditentukan di awal oleh para mitra, dan harus diperuntukkan bagi kedua-dua belah pihak.</p>	<p>Berasaskan nisbah yang dipersetujui.</p> <p>Nisbah pembagian keuntungan dapat diubah sesuai kesepakatan.</p> <p>Mitra boleh mensyaratkan jika keuntungan melebihi batas tertentu, untuk melepaskan haknya (<i>tanāzul</i>)</p>
Resiko Kerugian	<p>Dibagikan: proporsional menurut kadar saham dalam modal.</p>	<p>Ditanggung berdasarkan nisbah sumbangan modal.</p>
Jaminan	<p>Bagi tujuan menghindari terjadinya penyimpangan LKS dapat meminta jaminan.</p>	<p>Jaminan hanya dapat dibuat dalam kasus terjadi kecurian serta pelanggaran syarat-syarat</p>

		<i>musyārahah</i> .
Manajemen <i>Musyārahah</i> (Ketentuan Teknis)	Setiap mitra berhak mengelola aset usaha dalam proses bisnis normal.	Dilakukan oleh para mitra atau Oleh pihak ketiga yang dilantik oleh para mitra (<i>wakalah, ijarah</i> atau <i>muḍārabah</i>). Akun bersama atau pendirian badan usaha baru.
Jangka Waktu	Tidak ditetapkan	Tidak ditetapkan
Penyelesaian sengketa	Musyawah/ Basyarnas	Musyawah, MPS, Biro Mediasi Keuangan.
Akad	Dijabarkan secara tertulis (melalui korespodensi atau cara komunikasi modern)	Tidak dinyatakan
Dalil yang Digunakan	1. QS Al-Sād ayat 24 2. QS Al-Māidah ayat 1 3. Hadis Riwayat : a. Abu Dawud (No. 3383) Al-Hakim (No. 2369) b.al-Tirmizi (No. 1352) 4. Taqrir Baginda SAW.	1. QS Al-Sād ayat 24 2. Hadis Riwayat : a. Al-Daruqutni (No 2934- M. Al-Risalah) 3. Atsar sahabat a.Al-Zailai' (Nasb Rayah) b. Abdul Razzaq (No 15075- Majlis Ilmi)

	5. <i>Ijma' Ulama</i> 6. Kaidah Fikih	4. <i>Ijma' Ulama</i>
Metode <i>Istinbāt al-Hukmi</i> dan penetapan fatwa tentang akad <i>musyarakah</i> . (Analisis) (Lihat hal. 77-78)	1. <i>Nas Qathi</i> : Legalitasnya 2. <i>Manhaji (Maslahah)</i> : Jaminan dalam akad <i>musyarakah</i> . 3. <i>Qauli</i> : Ketentuan tentang rukun dan syarat akad, para pihak, objek dan sebagainya sesuai pendapat para ulama dalam kitab mu'tabar.	1. <i>Nas Qathi</i> : Legalitasnya 2. <i>Manhaji (Maslahah)</i> : Jaminan dalam akad <i>musyarakah</i> . 3. <i>Qauli</i> : Ketentuan tentang rukun dan syarat akad, para pihak, objek dan sebagainya sesuai pendapat para ulama dalam kitab mu'tabar.
Peraturan Terkait	Fatwa DSN MUI No 8 /2000 : <i>Musyarakah</i> PBI 10/ 16/ PBI/ 2008. SEBI 14/ 10/ DPbS/ 2008. Buku Standar <i>Musyarakah</i> OJK 2016.	Resolusi Syariah MPS BNM Edisi Kedua: <i>Pembiayaan Musyarakah</i> . BNM/ RH/GL 007-9 Standar <i>Musyarakah</i> BNMBNM/RH/STD 028-7 2015
Tanggal ditetapkan	13 April 2000	29 September 2005

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab yang sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

4.1. Kesimpulan

1. Fatwa DSN MUI dan MPS BNM tentang pembiayaan *musyarakah* secara bersamaan mengarah kepada jenis *musyarakah amwāl* berbentuk *'inān*. Ini karena ketentuan didalamnya mengharuskan masing-masing pihak untuk berkontribusi dana dan usaha. Manakala pembagian keuntungan ditentukan sesuai kesepakatan tanpa diharuskan berlaku persamaan. Perbedaannya adalah pada fatwa DSN MUI terdapat dua ayat Al-Quran yang telah dijadikan sebagai sandaran kebolehan akad *musyarakah*, tiga buah hadis, *ijma'* dan satu kaidah fikih. Sedang dalam resolusi MPS BNM hanya terdapat satu ayat Al-Quran, satu hadis Rasulullah SAW, dua *atsar* dari para sahabat Baginda SAW dan *ijma'* para ulama.
2. Ayat Al-Quran yang dijadikan sandaran adalah ayat pertama Surah al-Maidah (QS 5: 1) dan ayat kedua puluh empat dari Surah Sād (QS 38: 24). Sedangkan hadis yang digunakan diriwayatkan oleh al-Zaylai', Ibnu Hajar al Asqalani, Abu Daud, al-Tirmidzi, al-Daruquthni dan Abdul Razaq al-Shan'ani pada bab tersebut. *Ijma'* ulama pula didasarkan dengan adanya *taqrir* Nabi terhadap kegiatan *musyarakah* yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu. DSN MUI

mencantumkan satu kaidah fikih muamalah sebagai pelengkap bagi dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya yang berarti “ *hukum asal setiap transaksi muamalah adalah dibolehkan kecuali jika datang dalil yang mengharamkannya* ”. Sedang kaidah ini tidak dinyatakan dalam resolusi MPS BNM.

3. Dalam analisis kaidah *istinbāt* hukumnya, DSN MUI dan MPS BNM menggunakan pendekatan *Nas Qathi'* ketika menjelaskan legalitas akad *musyarakah* sesuai pengertian dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang dicantumkan tentang kebolehan akad *musyarakah*. Pendekatan *manhaji* juga digunakan oleh DSN MUI dan MPS BNM ketika membenarkan jaminan bagi menghindari berlakunya kerugian yang disebabkan oleh kesengajaan atau kecuaiian para pihak (atas dasar *masalah*). Sedang ketentuan-ketentuan lain fatwa DSN MUI dan MPS BNM baik yang menyangkut syarat akad, rukun akad, ketentuan para pihak, objek akad dan lainnya yang ada dalam keputusan tersebut berdasarkan pendapat-pendapat (*aqwāl*) para ulama yang mu'tabar. Ia sebagaimana terangkum dalam kitab-kitab fikih seperti *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, *Fiqh Sunnah*, *Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah*, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, *Al-Mughni* dan lain sebagainya.

4.2. Saran-saran

Berdasarkan dari penjelasan dan kesimpulan dalam skripsi ini penulis ingin menyarankan beberapa hal mengenai *musyarakah*, diantaranya yaitu:

1. Peneliti menyarankan kepada DSN MUI dan MPS BNM agar sentiasa proaktif dan peka dengan keperluan masyarakat terhadap transaksi berasaskan akad perkongsian dan investasi. Antaranya merevisi kembali mana-mana bagian fatwa terdahulu yang mempunyai perbezaan sehingga tidak terjadinya pertentangan sesamanya seperti definisi *musyarakah* dan ketentuannya. Selanjutnya menjalin kerjasama erat diantara sesama lembaga fatwa yang ada baik dalam maupun luar negara, sehingga terhasil sinkronisasi regulasi tentang *musyarakah* di rantau ini.
2. Kepada Fakultas Syari'ah disarankan untuk terus melakukan studi intensif terutama melibatkan bidang muamalah. Kajian tersebut diharapkan mampu menawarkan solusi pemberdayaan yang populis, praktis dan diterima oleh masyarakat. Antaranya dengan mengoptimakan pengkajian tentang akad berasaskan perkongsian baik *musyarakah*, *muḍārabah* dan akad turunannya.
3. Kepada para penuntut ilmu di bidang ekonomi syari'ah, agar berani dan siap untuk membekali diri dengan ilmu dan kemahiran melakukan *istinbāt* hukum serta fatwa. Juga penguasaan tentang akad *bai'*, akad *isytirak*, akad *tabarru'* dan sebagainya. Dengan demikian akan lahir kesanggupan bagi menjawab dan menyelesaikan permasalahan pemberdayaan masyarakat. Serta terhindar daripada mengeluarkan hukum atau fatwa yang melenceng dari kebenaran.
4. Kepada LKS agar sentiasa memastikan segala urusan dan transaksi akad perkongsian (*isytirak*) berlaku sesuai dengan

segala ketentuan syariat yang telah dijabarkan didalam fatwa-fatwa ekonomi syariah yang telah ada. Demikian juga supaya terus gencar melakukan inovasi, sosialisasi dan promosi produk-produk keuangan syari'ah berdasarkan *musyarakah* sebagai alternatif yang terbaik berbanding produk investasi konvensional.

5. Kepada ummat Islam agar sentiasa menitik beratkan prinsip syari'ah dan halal dalam transaksi perekonomian Antaranya melalui pemanfaatan akad *musyarakah* secara optima. Saat wujudnya permasalahan agama yang memerlukan penjelasan hukum, perlulah merujuk kepada pihak serta badan berotoritas seperti lembaga fatwa yang bersangkutan. Ketika telah wujud solusi yang halal maka harus diprioritaskan dan didukung dengan saksama.
6. Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, penulis menyarankan kepada para mahasiswa yang lain untuk meneruskan kajian ini, guna menyempurnakan penelitian yang telah dilakukan. Baik pengkajian komparasi *istinbāt al-hukmi* serta metode berfatwa, kajian implementasi fatwa-fatwa di lapangan atau kajian fatwa-fatwa turunannya. Cabang kajian ini terlalu luas dan masih memerlukan penelitian yang teliti, intensif serta komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qura'n Al-Karim

AAOIFI, *al-Ma'ayir al-Syar'iyyah*, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), 2010.

'Abd Rahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala Mazāhib Arba'ah*, Beirut: Dar Kutb Ilmiah, 2002.

Al-Zaylai', *Nasb al-Rayah li Ahādīs al-Hidayah*, S.Afrika: Muasasah Rayyan, 1997.

'Abdul Aziz Khayyat, *Al-Syarikāt fi al-Syariat al-Islam*, Beirut: al-Risalah, 1994.

'Abdul Karim Zaidan, *Al-Wājiz fi Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Muasasah al-Qurtubah, 1976.

'Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Darul Qalam, 1978.

'Abdul Razzaq al-San`ani, *Musannaf Abdul Razzaq*, South Africa: Majlis Ilmi, 1983.

'Athiyyah 'Adlan, *Mausu'ah Qawāid Fiqhiyyah Muamalah*, Mesir: Dar Iman, 2007.

'Ali Khafif, *al-Syarikāt fi al-Fiqh Islami Buhuts Muqāranah*, Mesir: Dar Fikr, 2009.

Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Keuangan*, Cet. 10, Jakarta: Grafindo, 2004.

Ahmad Muhammad al-Zarqa', *Syarh Qawāid Al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar Qalam, 1979.

A. Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.

Asrorun Ni'am, *Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI*, Jakarta: MUI, 2017.

Bank Negara Malaysia, *Manual Rujukan IKS kepada MPS*, Malaysia: BNM, 2010.

DSN MUI, *Fatwa DSN-MUI No 8 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*.

- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al-Marām Adillah Ahkam*, Mesir: Dar Salam, 2008.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, 'Amman: Bait Ifkar, 2007.
- Ibn Manẓur al-Afrīqīy, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1999.
- Ibnu Munzir al-Naisaburi, *Kitab Al-Ijmā'*, Cet. 2, Ajmān: Maktabah Furqan, 1999.
- Ibnu Qudamah al-Maqdīsi, *Al-Mughni*, Juz 7, Riyadh: Dar 'Alim Kutub, 1997.
- Isa 'Abduh, *'Uqūd Syari'yyah li Muamalāt Maliah*, Mesir: Dar Al-I'thiṣom, 1977.
- ISRA, *Islamic Financial System: Principles and Operations*, Kuala Lumpur: ISRA, 2012.
- Kartini Kartono, *Pengantar Riset Metodologi Sosial*, Bandung: Mandur Maju, 1991.
- Malaysia, *Akta Bank Negara Malaysia Tahun 2009*.
- Malaysia, *Akta Perkhidmatan Kewangan Islam Tahun 2013*.
- Ma'aruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Depok: Elsas Jakarta, 2008.
- Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyārahkah*, Jakarta: Kencana Prenada, 2012.
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- MPS Bank Negara Malaysia, *Resolusi Syariah Edisi Kedua*, Malaysia: BNM, 2010.
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Milkiyyah wa Naẓariyah al-Aqd fī al-Syāri'ah Islamiah*, Kaherah: Dar Fikr Arabi : 1996.

- Muhammad Ali al-Syaukāni, *Nail Authar Syarh Muntaqa Akhbar*, Mesir: Dar Hadis, 1993.
- Muhammad Ali al-Shabūni, *Sofwah al-Tafāsir*, Beirut: Dar Quran al-Karim, 1981.
- _____, *Rawa'iu Bayan fi al-Tafsir Ayat Al-Ahkam*, Suriah: Maktabah al-Ghazali, 1980.
- Muhammad al-Tuwaijiri, *Mausūah al-Fiqh al-Islāmi*, Amman: Bait Afkar al-Dualiah, 2009.
- Muhammad Ismail al-Shana'ni, *Subulussalam Syarh Bulugh al-Marām*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustofa, 1995.
- Muhammad Maksum, *Fatwa Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, Malaysia dan Timur Tengah*, Jakarta: Badan Litbang Diklat Kemenag RI, 2013.
- Muhammad Salam Madkūr, *Madkhal fi al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Dar Hadis, 1996.
- Muhammad Taqi Uthmani, *An Introduction to Islamic Finance*, USA: Kluwer, 2002
- Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhāl al-Fiqhī al-Amm*, Damaskus: Dar Qalam, 2004.
- MUI, *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: MUI, 1997.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Nadrattuzaman Hosen dan Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan & Ekonomi Syaria* Jakarta: PKES, 2007.
- Nasrun Haroen dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Van Hoeve, 1999
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nazih Hammad, *Mu'jam Muṣṭalahāt al-Maliah*, Damaskus: Dar Qalam, 2008.
- _____, *Fiqh Muāmalah Māliyah Masrafiyah*, Damaskus: Dar Qalam, 2007.

- Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Rafiq Yunus al-Mishri, *Fiqh al-Muamalah al-Maliah*, Damaskus: Dar Qalam, 2005.
- Rasyad Hasan Khalil, *Al- Syarikāt fi al-Fiqh al- Islami*, Riyadh: Dar Rasyid, 1981.
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Ed. 1, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. Khas, Juz 3, Kaherah: Fath 'Ilam Arabi, t.t.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, Cet.1, Jakarta: Pustaka Utama Grafit, 1999.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Taha Jabir Al-'Alwani, *Usul Al-Fiqh Al-Islami: Source Methodology in Islamic Jurisprudence*, USA: IIIT, 1993.
- Taqiyuddin al-Nabhāni, *Nizām al-Iqtisād fi al-Islamī*, Beirut: Dar Ummah, 2004.
- al-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa, *Jami' Sahih Al-Tirmidzi*, Beirut: Dar Kutub Ilmiah, t.t.
- Tim Penyusun, *Buku Standar Musyarakah*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Tim Penyusun JAKIM, *Glosari Muamalat*, Cet. 1, Kuala Lumpur: JAKIM, 2009.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Fikr, 1985.
- _____, *Kitāb Al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh*, Damaskus: Dar Fikr, 1999.
- Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwā Baina Al-Indibāq wa al-Tasayyub*, Mesir: Dar Sahwah, 1988.

Jurnal

- Agus Mahfudin, Majelis Ulama Indonesia dan Metode Fatwa, *Religi: Jurnal Studi Islam*, Vol 6, No 1, April 2015.
- Akram Laldin dkk, Fatwas In Islamic Banking: A Comparative Study Malaysia and Gulf Cooperation Council (Gcc) Countrie, *ISRA Research Paper No 31/2012*.
- Asjmuni Abdurrachman, “Prosedur Penetapan Keputusan Fatwa DSN-MUI”, *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi 18, 2008.
- Idris, Pendekatan *Manhāji* sebagai Upaya Penemuan Hukum Islam, *Jurnal Al-Afkar*, Vol. I, No. 2, 2016.
- Imam Abdul Hadi, “Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) pada Bank Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2011.
- Lutfan Muntaqo, Fiqh Sosial: Pemikiran KH. M.A. Sahal Mahfudz, *Jurnal Manarul Quran*, Juni 2016.
- Mohd Izzat dan Ruzian Markom, “ Peranan dan Kedudukan Majlis Penasihat Syariah untuk Memperkasakan Sistem Kewangan Islam di Malaysia”, *Jurnal Pengurusan*, No 38, 2013.
- Mohamed Hadi Hamid, “ Majlis Penasihat Syariah: Nasihat yang Mesti Dipatuhi ”, *Jurnal Muamalat*, Bil. 4, 2011.
- Moh.Tolchah, “Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Pemikiran M. ‘Atho Mudzhar)”, *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam El-Banat* , 2011.
- Muhammad Hafiz Badarulzaman, Akta Bank Negara 2009 : Implikasi Sebelum dan Selepas Pindaan Terhadap Majlis Penasihat Syariah, *Jurnal Muamalat Bil. 7*, 2014.
- Rahmani Timorita Yulianti, “Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI tentang Produk Perbankan Syari’ah”, *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. I, No. 1, Juli 2007.
- Soleh Hasan Wahid, “Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” *Jurnal Ahkam*, Vol 4, No 2, November 2016.

Suhaimi Mohd Yusof dan Ahmad Hazim Alias, Pendekatan Membuat Keputusan Syariah dalam Kewangan Islam, *Jurnal Muamalat*, Bil. 1/2008.

Zulqarnain, “Penetapan Hukum dalam Hukum Islam: Analisis Pengambilan Hukum dalam Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah”, *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 12, No. 1, 2012.

Zulkifli Hasan, Regulatory Framework of Shari’ah Governance System in Malaysia, GCC Countries and the UK. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 3-2 March 2010.



مجلس الشريعة الإسلامية
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 08/DSN-MUI/IV/2000

Tentang
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan;
 - bahwa pembiayaan musyarakah yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS);
 - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *musyarakah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. Shad [38]: 24:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh; dan amat sedikitlah mereka ini...."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

3. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا.

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

4. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

5. Taqirir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.
6. Ijma’ Ulama atas kebolehan musyarakah.
7. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Beberapa Ketentuan:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

- c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - b. Kerja
 - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
 - c. Keuntungan
 - 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

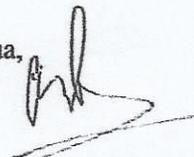
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
 - 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
 - d. Kerugian
Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
4. Biaya Operasional dan Persengketaan
- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

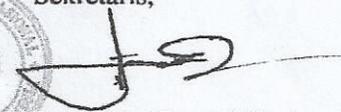
Tanggal : 08 Muharram 1421 H.
13 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani



Musyarakah merupakan kontrak perkongsian antara dua pihak atau lebih untuk membiayai sesuatu usaha niaga perniagaan dan semua pihak yang terlibat menyumbangkan modal sama ada dalam bentuk tunai atau lain-lain. Keuntungan daripada perkongsian tersebut akan dikongsi bersama berdasarkan nisbah yang dipersetujui, manakala kerugian akan ditanggung bersama berdasarkan nisbah sumbangan modal masing-masing. Konsep *musyarakah* pada hari ini digunakan dalam aktiviti-aktiviti pelaburan dan juga pembiayaan. Pembiayaan berasaskan *musyarakah* merangkumi pembiayaan modal kerja (*working capital financing*), pembiayaan perdagangan (*trade financing*) dan pembiayaan aset (*asset financing*).

29. Produk Pembiayaan Berasaskan *Musyarakah*

Sebuah institusi kewangan Islam bercadang untuk menawarkan dua bentuk produk pembiayaan berasaskan konsep *musyarakah*. Antara syarat umum kedua-dua pembiayaan *musyarakah* yang dicadangkan adalah seperti yang berikut:

- i. Semua pihak dalam *musyarakah* perlu menyumbang modal;
- ii. Institusi kewangan Islam sebagai rakan kongsi/pembiaya boleh meletakkan syarat-syarat tertentu (*taqyid*);
- iii. Pembahagian keuntungan adalah berasaskan nisbah yang dipersetujui manakala kerugian ditanggung berdasarkan nisbah sumbangan modal;
- iv. Tiada jaminan pada modal. Jaminan hanya boleh dibuat dalam kes kecuaiian dan pelanggaran syarat-syarat perjanjian *musyarakah*;
- v. Nisbah pembahagian keuntungan boleh diubah dengan persetujuan bersama semua rakan kongsi;
- vi. Syarat pembelian semula bahagian mana-mana rakan kongsi adalah berdasarkan harga pasaran (*qimah suqiyah*) atau harga yang dipersetujui bersama dan bukannya harga nominal (*qimah ismiyyah*); dan
- vii. Mana-mana rakan kongsi dalam *musyarakah* boleh meletakkan syarat bahawa sekiranya keuntungan melebihi had tertentu (*siling*), salah seorang rakan kongsi boleh melepaskan hak (*tanazul*) keuntungan yang melebihi had tersebut.

Dua bentuk pembiayaan secara *musyarakah* yang dicadangkan adalah seperti yang berikut:

1. *Projek usaha sama atau perkongsian berasaskan akaun bersama tanpa penubuhan sebuah entiti yang berasingan*

Perjanjian pembiayaan *musyarakah* akan dimeterai antara institusi kewangan Islam dengan pelanggan. Pembiayaan akan disalurkan ke dalam akaun bersama secara sekaligus atau secara berperingkat. Akaun bersama tersebut akan didaftarkan atas nama pelanggan manakala perjalanan urus niaga akaun akan diselenggarakan secara bersama oleh institusi kewangan Islam dan pelanggan.

2. *Penyertaan ekuiti yang melibatkan penubuhan sebuah syarikat usaha sama sendirian berhad di bawah Akta Syarikat 1965*

Sebuah entiti korporat akan ditubuhkan oleh institusi kewangan Islam dan pelanggan bagi menjalankan projek tertentu. Pengurusan syarikat akan dilantik oleh kedua-dua pihak bagi mewakili kepentingan mereka dan bertanggungjawab terhadap kemajuan projek. Institusi kewangan Islam akan membuat pembayaran pembiayaan *musyarakah* secara sekaligus melalui penambahan modal berbayar syarikat sendirian berhad.

Dalam hal ini, MPS dirujuk berhubung dengan isu sama ada cadangan kedua-dua bentuk pembiayaan berasaskan *musyarakah* seperti di atas dibenarkan Syarak.

Keputusan

MPS pada mesyuarat ke-53 bertarikh 29 September 2005 telah memutuskan bahawa produk pembiayaan berasaskan *musyarakah* seperti yang dicadangkan adalah dibenarkan selagi tiada elemen jaminan modal dan/atau keuntungan oleh rakan kongsi ke atas rakan kongsi yang lain.

Asas Pertimbangan

Keputusan di atas adalah berdasarkan pertimbangan terhadap dalil-dalil berkaitan keharusan *musyarakah* seperti yang berikut:

- i. Firman Allah SWT:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَبَغِيٌّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

"...dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bergaul itu, setengahnya berlaku zalim kepada setengahnya yang lain, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, sedang mereka amatlah sedikit..."³⁵

Perkataan **الْخُلَطَاءِ** dalam ayat di atas membawa maksud perkongsian. Berdasarkan ayat di atas, *musyarakah* merupakan Syariat lama yang tidak dimansuhkan. Amalan ini telah sedia ada sejak zaman Nabi Daud dan tidak ditegah oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, *musyarakah* perlu dilaksanakan secara adil dan berlandaskan Syarak.

- ii. Apabila Rasulullah SAW dilantik sebagai pesuruh Allah SWT, masyarakat Arab telah menjalankan *mua'malah* secara *musyarakah* dan Rasulullah SAW membenarkannya seperti sabda baginda:

يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما

"Pertolongan Allah SWT ke atas dua orang yang bersyarikat adalah selagi mana salah seorang daripada kedua-duanya tidak mengkhianati rakan kongsinya. Sekiranya salah seorang mengkhianati rakan kongsinya maka Allah SWT akan mengangkat pertolonganNya daripada kedua-duanya."³⁶

- iii. Terdapat riwayat sahabat Rasulullah SAW yang menyatakan tentang keharusan *musyarakah* seperti yang berikut:

الرِّبْحُ عَلَىٰ مَا شَرَطًا وَالْوَضِيعَةُ عَلَىٰ قَدْرِ مَالَيْنِ

"Keuntungan adalah berdasarkan apa yang telah disyaratkan dan kerugian adalah berdasarkan kadar harta (pihak yang berkongsi)."³⁷

الْوَضِيعَةُ عَلَىٰ الْمَالِ وَالرِّبْحُ عَلَىٰ مَا اضْطَلَحُوا عَلَيْهِ

"Kerugian adalah berdasarkan kadar harta, dan keuntungan adalah berdasarkan apa yang disyaratkan."³⁸

- iv. Secara umumnya, ulama bersependapat dalam mengharuskan syarikat atau *musyarakah*, walaupun mereka berselisih pendapat mengenai jenis-jenis *musyarakah* yang dibenarkan.

³⁵ Surah Sad, ayat 24.

³⁶ Al-Daraqutni, *Sunan al-Daraqutni*, Mu'assasah al-Risalah, 2004, j. 3, h. 442, hadis no. 2934.

³⁷ Al-Zaila'i, *Nasb al-Rayah li Ahadis al-Hidayah*, Mu'assasah al-Rayyan, 1997, j. 3, h. 475.

³⁸ Abdul Razzaq al-San'ani, *Musannaf Abdul Razzaq*, Al-Maktab al-Islami, 1403H, j. 8, h. 248.

DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Struktur organisasi DSN terdiri dari Pengurus Pleno dan Badan Pelaksana Harian Ketua DSN-MUI dijabat Ex Officio Ketua Umum MUI dan sekretaris DSN-MUI dijabat Ex Officio Sekretaris Umum MUI. Adapun keanggotaan DSN diambil dari pengurus MUI, Komisi Fatwa MUI, Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam, Pesantren dan para praktisi perekonomian syariah yang memenuhi kriteria dan diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN yang mana keanggotaan baru DSN ditetapkan oleh Rapat Pleno DSN-MUI. Tercatat sampai dengan Januari 2018 DSN MUI telah mengeluarkan 116 fatwa

PENGURUS PLENO DSN-MUI

MASA KHIDMAT 2015-2020

Ketua DR. KH. Ma'ruf Amin

Wakil Ketua

1. Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.A.
2. Drs. KH. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.
3. Prof. Dr. H. Muhammad.Amin Suma, S.H., M.A., M.M.

Sekretaris

Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.

Wakil Sekretaris

Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Anggota

1. Dr. H. M. Anwar Ibrahim
2. Prof. Dr. H. Samsul Anwar, M.A.
3. KH. Muhyiddin Djunaidi, M.A.
4. Prof. Dr. H. Maman Abdurrahman, M.A.
5. Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si.
6. Muhammad Siddiq
7. Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, M.A.
8. Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, M.A.
9. Dr. H. Subarjo Joyosumarto
10. Drs.H.Karnaen A. Perwataatmadja, M.P.A.
21. Dr. Mulya E. Siregar
22. Dahlan Siamat, S.E., M.M.
23. Suminto Sastrosuwito
24. Ahmad Buchori
25. Edy Setiadi
26. Moch. Muchlasin
27. M. Jusuf Wibisana
28. Fadilah Kartikasasi
29. Friderica Widayarsi Dewi
30. H. Muh. Taufik Ridlo, Lc., M.A.

- | | |
|--|--|
| 11. Dr. H. M. Syafi'i Antonio, M.Ec. | 31. Ir. H. Muhammad Syakir Sula A. A. I. J., F. I. I. S. |
| 12. Prof. Dr. KH. Achinad Satori Ismail | 32. Drs. Agustianto Mingka, M.A. |
| 13. Prof. Dr. H. Decie Rosada, M.A. | 33. Dr. H.M. Cholil Nafis, Lc., M.A. |
| 14. Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya; M.A. | 34. Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad |
| 15. Dra. Hj. Mursyidah Thahir, M.A. | 35. H. Zafrullah Salim, S.H., M.H. |
| 16. Dr. H. Jafri Khalil, M.C.L., F.I.I.S. | 36. H. Muhammad Faiz, M.A. |
| 17. Dr. H. Ahmad Sayuti Anshari Nasution, M.A. | 37. Dr. H. Jeje Zaenuddin |
| 18. Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah | 38. H. Misbahul Ulum, M.Si. |
| 19. Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.A. | 39. Hj. Siti Haniatunnisa, L.L.B., M.H. |
| 20. Dra. Hj. Siti Ma'rifah, S.H., MM | 40. Dr. Hj. Gusniarti, M.A. |

BADAN PELAKSANA HARIAN (BPH)

MASA KHIDMAT 2015-2020

Ketua DR. KH. Ma'ruf Amin

Wakil Ketua

- | | |
|---|--|
| 1. Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A. | 3. Ir. H. Adiwarmanto Karim, SE, M.B.A., M.A.EP. |
| 2. Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag. | 4. Dr. Hasanudin, M. Ag. |

Sekretaris Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.

Wakil Sekretaris

1. Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si.
2. Dr. H. Setiawan Budi Utomo
3. H. Kanny Hidayat, S.E., M.A.
4. M. Gunawan Yasni, S.E. Ak., M.M., C.I.F.A., F.I.I.S., C.R.P.

Bendahara Dr. Ir. H. Nadrattuzaman Hosen, M.Ec.

Wakil Bendahara Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A.

Bidang Perbankan

Ketua H. Ikhwan Abidin Basri, M.A., M.Sc.

Sekretaris Dr. H. Oni Sahroni, M.A.

Anggota

1. H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec.
2. Dr. KH. Abdul Ghofur Maimun
3. Dr. H. Muhammad Maksum, M.A.
4. Dr. Jaenal Effendi, M.A.
5. Dr. H. Rahmat Hidayat, S.E., M.T.

Bidang Pasar Modal

Ketua Iggi H. Achsien, S.E., M.B.A.

Sekretaris Ah. Azharuddin Lathif, M.H., M.Ag.

Anggota

1. Muhammad Touriq, S.E., M.B.A.
2. Dr. Yulizar Djamaludin Sanrego, M.Ec.
3. Dr. Irfan Syauqi Beik, M.Sc.
4. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A.
5. Dr. H. Noor Achmad, M.A.

Bidang IKNB

Ketua Ir. H. Agus Haryadi, A.A.A.I.J., F.I.I.S., A.S.A.I.

Sekretaris Dr. H. Mohamad Hidayat, M.B.A., M.H.

Anggota

1. A.M. Hasan Ali, M.A.
2. Priyono, S.E.
3. Amin Musa, S.E.
4. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag.
5. H. Azrul Tanjung, S.E., M.Si.

Bidang Bisnis dan Wisata

Ketua Dr. dr. H. Endy M. Astiwara, M.A., A.A.A.I.J., C.P.L.H.I., F.I.I.S.

Sekretaris Moch. Bukhori Muslim, Lc., M.A.

Anggota

1. Prof. Drs. H. M. Nahar Nahrawi, S.H.
2. Drs. H. Aminudin Yakub, M.A.
3. Dr. Nasimul Falah, S.H., M.H.
4. M. Dawud Arif Khan, E.Ak., M.Si., C.P.A.
5. Hery Sucipto, Lc., M.M.

Sumber : <https://dsnmui.or.id/kami/pengurus>

MAJLIS PENASIHAT SYARIAH BANK NEGARA MALAYSIA

Anggota MPS, yang terdiri daripada cendekiawan Syariah, pakar undang-undang dan pengamal pasaran yang terkemuka, merupakan individu yang berkeelayakan dan mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang perbankan, kewangan, ekonomi, undang-undang dan aplikasi Syariah, terutamanya dalam bidang ekonomi dan kewangan Islam.

Anggota Majlis Penasihat Syariah Periode 2016-2019

1. Datuk Dr. Mohd Daud Bakar (Chairman)
Ketua Pegawai Eksekutif Institut Antarabangsa bagi Kewangan Islam.
2. Tan Sri Sheikh Ghazali Abdul Rahman
Penasihat Shariah kepada Attorney General Chamber.
3. Prof. Dr. Mohamad Akram Laldin
Pengarah Eksekutif, International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA)
4. Prof. Dr. Engku Rabiah Adawiah Engku Ali
Profesor, Kulliyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
5. Prof. Dr. Ashraf bin Md. Hashim
Ketua Pegawai Eksekutif, International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA)
6. Prof. Dr. Asmadi Mohamed Naim
Profesor, Universiti Utara Malaysia (UUM)
7. Dr. Shamsiah Mohamad
Peneliti Senior di International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA)
8. En. Burhanuddin Lukman
Peneliti, International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA)
9. Datuk Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri
Mufti Wilayah Persekutuan
10. Dato' Abdul Aziz Abdul Rahim
Ahli MPS BNM

Mantan Anggota MPS BNM

Dato' Dr. Abdul Halim Ismail
Sessions of Appointment: 1997 - 2013

Prof. Madya Dr. Aznan Hasan
Sessions of Appointment: 2006 - 2008, 2010 - 2013

Dr. Muhammad Anwar Ibrahim

Session of Appointment: 2010 - 2013

Datuk Haji Md. Hashim Yahaya
Sessions of Appointment: 1997 - 2010

Dato' Wan Mohamad Dato' Sheikh Abd. Aziz
Session of Appointment: 2008 - 2010

Dr. Muhammad Syafii Antonio
Sessions of Appointment: 2006 - 2010

Prof. Madya Dr. Abdul Halim Muhammad
Sessions of Appointment: 2004 - 2008

Dr. Mohd Parid Sheikh Ahmad
Sessions of Appointment: 2004 - 2008

Prof. Datuk Dr. Abdul Monir Yaacob
Sessions of Appointment: 1999 - 2006

Dr. Mohd Ali Baharum
Sessions of Appointment: 2001 - 2006

Prof. Dr. Joni Tamkin Borhan
Sessions of Appointment: 1999 - 2003

Prof. Dato' Dr. Haji Othman Ishak
Session of Appointment: 1997 - 1999

Dato' Dr. Haron Din
Session of Appointment: 1997 - 1999

Dr. Ahmed Ali Abdalla
Session of Appointment: 1997 - 1999

Allahyarham Prof. Emeritus Tan Sri Datuk Ahmad Ibrahim
Session of Appointment: 1997 - 1999

Allahyarham Dato' Sheikh Azmi Ahmad
Session of Appointment: 1997 - 1999

Allahyarham Dr. Abdullah Ibrahim
Session of Appointment: 1997 - 1999

Sumber : <http://www.bnm.gov.my> dan <http://www.sacbnm.org/>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama / NIM : Gulbuddin Hekmatyar bin Lukman / 140102238
2. Tempat / Tanggal Lahir : Kampung Losong Haji Mat Shafie, Terengganu
Malaysia / 04 Juni 1992 M - 5 Zulhijjah 1412 H
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan / Suku : Malaysia/ Melayu
6. Status Perkawinan : Belum kawin
7. Alamat Sekarang : Rumah Anak Malaysia, Kompleks Cadek Permai,
Kec. Baitussalam, Kahju, Aceh Besar, Indonesia.
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Orang Tua / Wali
 - a. Nama Ayah : Haji Lukman bin Haji Muhammad
 - b. Nama Ibu : Zaharani binti Haji Ahmad
 - Pekerjaan : Pengusaha/ Guru Agama
 - Alamat : 795 Kampung Losong Haji Mat Shafie, 21000
635 D Kampung Batu Enam, Jln. Kelantan 21200
Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman.
10. Jenjang Pendidikan
 - a. Sekolah Dasar : Madrasah Darul Taqwa
Berijazah Tahun 2003.
 - b. Sekolah Menengah : SM IMTIAZ Dungun
Ma'ahad Darul Quran, Rusila
Berijazah Tahun 2010.
 - c. Sekolah Tinggi : Darul Quran JAKIM
Berijazah Tahun 2014.
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Fak. Syari'ah dan Hukum,
Prodi. Hukum Ekonomi Syariah
Berijazah Tahun 2018

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 1 Januari 2018
Penulis,

Gulbuddin Hekmatyar Lukman